

**PENERAPAN E-GOVERNMENT SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN  
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAH DAERAH DI KOTA TEGAL**



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**MUCHAMMAD FAUZAN**

**NPM 5117500044**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

**2021**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING**

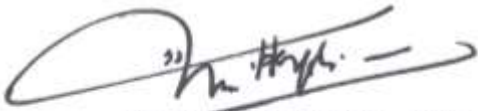
**PENERAPAN E-GOVERNMENT SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PARTISIPASI  
MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH DI  
KOTA TEGAL**

**MUCHAMMAD FAUZAN**  
**NPM 5117500044**


Telah Diperiksa dan Disetujui Dosen Pembimbing

Tegal, 16 Agustus 2021

Pembimbing I

  
**Tomi Haryadi, S.H., M.H.**  
NIDN. 0020045801

Pembimbing II

  
**Dr. Moh. Khamim, S.H., M.H.**  
NIDN. 0617026101

Mengetahui  
Dekan,

  
  
**Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag.**  
NIDN.0615067604

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PENERAPAN E-GOVERNMENT SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PARTISIPASI  
MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH DI  
KOTA TEGAL**

**MUCHAMMAD FAUZAN  
NPM 5117500044**

Telah Diperiksa dan Disahkan oleh

Tegal, 16 Agustus 2021

Penguji I



**Imam Asmarudin, S.H., M.H**  
NIDN. 0625058106

Penguji II



**Dr. Fajar Ari Sudewo, S.H., M.H.**  
NIDN. 0606066001

Pembimbing I



**Toni Haryadi, S.H., M.H.**  
NIDN. 0020045801

Pembimbing II



**Dr. Moh. Khamim, S.H., M.H.**  
NIDN. 0617026101



Mengetahui  
Dekan,

**Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag.**  
NIDN 0615067604

## HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muchammad Fauzan

NPM : 5117500044

Tempat/Tanggal Lahir : Tegal, 03 Agustus 1997

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : **PENERAPAN E-GOVERNMENT SEBAGAI  
UPAYA PENINGKATAN PARTISIPASI  
MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAH DAERAH DI KOTA TEGAL**

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta belum pernah ditulis oleh orang lain apabila dikemudian hari terbukti pernyataan penulis ini tidak benar, maka penulis bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah penulis peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tegal, 12 Agustus 2021

Yang menvatakan,



Muchammad Fauzan

## Abstrak

*E-Government* bermanfaat memberikan informasi dan pelayanan bagi masyarakat. *E-Government* seakan menjadi keniscayaan dalam perkembangan teknologi informasi, permasalahan dalam penerapan *E-Government* yang paling signifikan adalah kemampuan Sumber Daya Manusia, mengatasi permasalahan sistem atau jaringan dan tingkat partisipasi masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Sehingga tujuan penyelenggaraan *E-Government* adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Mengetahui bagaimana penerapan *E-Government* pada pemerintah daerah Kota Tegal. (2) Mengetahui bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui *E-Government* di Kota Tegal.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis, teknik pengumpulan datanya adalah melalui studi kepustakaan, wawancara, dan pengumpulan data yang kemudian dianalisis dengan cara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa , penerapan *E-Government* di Kota Tegal berjalan dengan baik karena adanya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Tegal. Salah satu contoh penerapan *E-Government* adalah membuat aplikasi berupa komponen sistem informasi yang mendukung pelaksanaan pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan Pemerintah Daerah. Dalam penerapannya hanya ada beberapa masyarakat yang telah menggunakan aplikasi tersebut. Masyarakat masih lebih banyak yang memilih untuk tidak menggunakan aplikasi e-government yang sudah disediakan oleh Pemerintah Kota Tegal.

Berdasarkan penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

**Kata Kunci :** *E-government*, Partisipasi Masyarakat, Kota Tegal.

## **Abstract**

E-Government is useful to provide information and services for the community. E-Government seems to be an inevitability in the development of information technology, the problem in the implementation of E-Government is the most significant human resources capability, addressing system or network problems and the level of community participation to realize good governance. So the purpose of E-Government implementation is to increase community participation.

This study aims to (1) Know how to apply E-Government to the local government of Tegal City. (2) Know how the level of community participation in the implementation of local government through E-Government in Tegal City.

This type of research is literature research, the approach used is sociological juridical, the data collection technique is through literature studies, interviews, and data collection which is then analyzed in qualitative ways.

The results of this study show that, the implementation of E-Government in Tegal city is running well because of the Electronic-Based Government System (SPBE) in Tegal City. One example of the implementation of E-Government is to make an application in the form of information system components that support the implementation of information technology utilization in the Local Government environment. In its application there are only a few people who have used the application. People still prefer not to use the e-government application that has been provided by the Tegal City Government.

Based on this research is expected to be a material information and input for students, academics, practitioners, and all parties in need in the Faculty of Law, University of Pancasakti Tegal.

**Keywords:** E-government, Community Participation, Tegal City.

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan karunia-Nya;
- Bapak Ali Rokhman, manusia yang tidak kenal lelah di masa hidupnya;
- Ibu Tuti Andriani, Ibu Kandung saya yang amat sangat saya cintai dan sayangi;
- Indah Nur Apriliani, saudara kandung saya yang selalu mendukung dan memberikan pembelajaran tentang kehidupan;
- Herdan Syahputra Harahap, saudara ipar saya yang selalu mendukung;
- Saudara-saudara yang selalu memberiku dukungan dan doanya;
- Messy Dayana yang sudah membantu dan memberikan dukungan dalam proses pengerjaan skripsi;
- Sahabat seperjuangan Rifo, Rizal, Ragil, dan Teman – teman Kelas B Ilmu Hukum yang selalu mendukung dalam proses penyelesaian skripsi ini; dan
- Teman-teman yang selalu memberikan semangat serta dukungan.

## **MOTTO**

“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”

(QS. Al-Insyiroh:6)

“Barang siapa belum merasakan pahitnya belajar walau sebentar, maka akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya.” (Imam Syafi'i)

Jika berlari tak mampu maka berjalan-lah, jika berjalan pun masih tak sanggup maka merangkak-lah. Tetaplah bergerak meskipun pelan.

(Imam Syafi'i)

Kehidupan yang tidak teruji adalah kehidupan yang tidak bernilai

(Socrates)

Kamu harus punya kemandirian dan kedaulatan untuk menciptakan kegembiraanmu sendiri dan jangan bergantung pada sesuatu di luar dirimu

(Emha Ainun Nadjib)



## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah Swt., *alhamdulillah* penyusunan skripsi ini dapat selesai. Dengan skripsi ini pula penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Rasulullah Saw. yang membawa rahmat sekalian alam.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak yang kepadanya patut diucapkan terimakasih. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada :

1. Prof. Dr. Fakhruddin, M.Pd. (Rektor Universitas Pancasakti Tegal).
2. Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag. (Dekan Fakultas Hukum Univeritas Pancasakti Tegal).
3. Kanti Rahayu, S.H., M.H. (Wakil Dekan I Fakultas Hukum Univeritas Pancasakti Tegal).
4. H. Toni Haryadi, S.H., M.H. (Wakil Dekan II Fakultas Hukum Univeritas Pancasakti Tegal).
5. Imam Asmarudin, S.H., M.H. (Wakil Dekan III Fakultas Hukum Univeritas Pancasakti Tegal).
6. Muhammad Wildan, S.H., M.H. (Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Univeritas Pancasakti Tegal).

7. H. Toni Haryadi, S.H., M.H. (Dosen Pembimbing I), Dr. Moh. Khamim S.H., M.H. (Dosen Pembimbing II) yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan pada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan pada penulis sehingga bisa menyelesaikan studi Strata 1. Mudah-mudahan mendapatkan balasan dari Allah Swt. sebagai amal shalih.
9. Segenap pegawai administrasi/karyawan Universitas Pancasakti Tegal khususnya di Fakultas Hukum yang telah memberikan layanan akademik dengan sabar dan ramah.
10. Orang tua, serta saudara-saudara penulis yang memberikan dorongan moriil pada penulis dalam menempuh studi.
11. Kawan-kawan penulis, dan semua pihak yang memberikan motivasi dalam menempuh studi maupun dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Semoga Allah Swt. Membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan kepada penulis. Akhirnya hanya kepada Allah Swt. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca umumnya.

Tegal, 16 Agustus 2021

**Penulis**

## DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
A. Abstrak Bahasa Indonesia.....	v
B. Abstrak Bahasa Inggris.....	vi
PERSEMBAHAN .....	vii
MOTTO .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Tinjauan Pustaka .....	6
F. Metode Penelitian .....	7
G. Sistematika Penulisan .....	12
BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL.....	13
B. Tinjauan Historis Otonomi Daerah .....	13
1. Masa Penjajahan Belanda .....	13
2. Masa Penjajahan Jepang .....	16
3. Masa Kemerdekaan Republik Indonesia .....	18
B. Tinjauan Tentang Penerapan <i>E-Government</i> .....	27
1. Pengertian <i>E-Government</i> .....	27
2. Manfaat <i>E-Government</i> .....	29
3. Tahapan Pengembangan <i>E-Government</i> .....	30

4. Tujuan Pengembangan <i>E-Government</i> .....	32
5. Strategi Pengembangan <i>E-Government</i> .....	33
6. Konsep <i>E-Government</i> .....	34
7. Klasifikasi <i>E-Government</i> .....	34
8. Penerapan <i>E-Government</i> di Indonesia .....	36
9. Faktor-faktor yang mempengaruhi <i>E-Government</i> .....	40
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	45
A. Bagaimana penerapan <i>E-Government</i> pada pemerintah daerah Kota Tegal... ..	45
B. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui <i>E-Government</i> di Kota Tegal .....	64
BAB IV PENUTUP .....	71
1. Simpulan .....	71
2. Saran .....	72
DAFTAR PUSTAKA .....	73
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	77

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Wilayah Administrasi Kota Tegal.....	46

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Bagan Organisasi PEMKOT Tegal .....	51
Gambar 1.2 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informasi.....	52
Gambar 1.3 Rangkaing E-Government Indonesia diantara 10 Negara Asia Tenggara Tahun 2020.....	62

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang mencakup banyak pulau dan berbagai suku bangsa. Dalam pelaksanaan pemerintahannya dibagi atas Provinsi yang dibagi atas Kabupaten dan Kota.<sup>1</sup> Bab VI Pasal 18 sampai dengan Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, selanjutnya dapat disingkat Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 dijalankan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD.<sup>2</sup> Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014, dan Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Peraturan Daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014

---

<sup>1</sup>Amelia Haryanti, “*Ssitem Pemerintahan Daerah*”, Tangerang: UNPAM PRESS, 2019, hlm. 13.

<sup>2</sup>Reynold Simandjuntak, “Sistem Desentralisasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional”, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 7, No. 1, 2015, hlm. 58

ini dilaksanakan pengelolaan yang bersifat menguatkan, diawali dari pembagian urusan pemerintahan yang akan menjadi pengutamaan daerah dalam penerapan otonomi yang seluas-luasnya.

Daerah otonom yang disebut daerah merupakan sekelompok masyarakat hukum yang memiliki batas wilayahnya dan memiliki hak, kekuasaan dan mempunyai kewajiban mengurus dan mengatur sendiri rumah tangganya di dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, pernyataan ini sejalan dengan kedaulatan yang dibuat dalam undang-undang yaitu daerah dibagi menjadi provinsi, dan provinsi terbagi atas kabupaten dan kota, dan setiap kabupaten dan kota memiliki pemerintah daerah.<sup>3</sup>

Agar dapat terwujudnya ketentraman masyarakat, dan pemerintahan pemerintah daerah yang baik perlu menyediakan kebutuhan masyarakat berupa informasi yang jelas. Salah satunya adalah dengan memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat melalui e-government yang merupakan penerapan teknologi informasi.

Teknologi informasi berkembang pesat mendorong terciptanya data informasi dan pengetahuan dalam semua bidang kegiatan, termasuk penyelenggaraan pemerintah. Sejak penggunaan teknologi informasi telah merambah luas kedalam organisasi sektor publik, ternyata pemanfaatan teknologi informasi tersebut mampu memberikan dampak positif dalam prosedur penyusunan kebijakan publik, selain itu juga mampu

---

<sup>3</sup>Siswanto Sunarno, "*Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*", Jakarta : Rineka Cipta, 2005, hlm. 15.



menciptakan transparansi dan akuntabilitas disektor pemerintahan. Kemajuan teknologi ini mengharuskan pemerintah mengikuti perkembangan teknologi berupa penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik untuk meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien sehingga tercipta pemerintahan yang baik. Sesuai yang terdapat dalam Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan *E-Government*.

*E-Government* merupakan suatu sistem teknologi informasi yang dikembangkan oleh pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik dengan memberikan pilihan kepada masyarakat untuk mendapatkan kemudahan akses informasi publik.<sup>4</sup> *E-Government* bermanfaat memberikan informasi dan pelayanan bagi masyarakat. *E-Government* dapat memperbaiki manajemen internal dan peningkatan pelayanan publik.<sup>5</sup> Dengan penerapan *E-Government* mempermudah masyarakat dalam pelayanan publik dan meningkatkan akselerasi pembangunan teknologi informasi dan komunikasi antara daerah, regional dan nasional.

Wujud nyata dari penerapan E-Government di Kota Tegal adalah telah mengaplikasikan pemanfaatan teknologi informasi sebagai upaya menuju *Smart City*. Diantaranya aplikasi jakwir cetem melayani dokumen kependudukan di Kota Tegal sehingga dokumen kependudukan bisa diantarkan kerumah langsung, kemudian layanan gawat darurat Lekon

---

<sup>4</sup> Kusuma Dewi Arum Sari dan Wahyu Agus Winarno, "Implementasi E-Government System Dalam Upaya Peningkatan Clean and Good Government di Indonesia," Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen Volume XI, No.1(2012), hlm.2.

<sup>5</sup> Ricardus Eko Indrajit "*E-Government in action*," Yogyakarta, ANDI, 2005:hlm.4.

Tangi melayani tentang penanganan kegawat daruratn medis pra rumah sakit,ada juga layanan lansia Jempolan untuk mengirimkan makanan bagi lansia dengan memanfaatkan transportasi online, dan terakhir layanan tanda tangan elektronik yang sudah diterapkan di 27 kelurahan. Kelebihan dari beberapa aplikasi yang diterapkan pemerintah Kota Tegal meningkatkan efisiensi dan data dapat dikirim secara cepat.

E-Government seakan menjadi keniscayaan dalam perkembangan teknologi informasi, permasalahan dalam penerapan *E-Government* yang paling signifikan adalah kemampuan Sumber Daya Manusia, mengatasi permasalahan sistem atau jaringan dan tingkat partisipasi masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Sehingga tujuan penyelenggaraan *E-Government* adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Maka dari itu penulis akan mengkaji penerepan *E-Government* dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di Kota Tegal.

Berdasarkan Latar belakang tersebut penulis tertarik mengkaji penelitian hukum dengan judul **“PENERAPAN *E-GOVERNMENT* SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH di KOTA TEGAL”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan *E-Government* pada pemerintah daerah Kota Tegal?

2. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui *E-Government* di Kota Tegal?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penerapan *E-Government* pada pemerintahan daerah Kota Tegal.
2. Untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui *E-Government* di Kota Tegal.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Administrasi Negara pada khususnya serta sebagai bahan pengetahuan tambahan untuk dapat dibaca masyarakat pada umumnya maupun dapat dipelajari lebih lanjut oleh kalangan hukum khususnya.

#### **2. Manfaat Praktis**

Beberapa manfaat secara praktis dari penelitian ini sebagai berikut :

- a Untuk mengkaji penerapan *E-Government* pada pemerintahan daerah Kota Tegal.

- b Untuk menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dalam menjalankan pemerintahan daerah melalui E-Government di Kota Tegal.
- c Untuk Mengkaji hambatan dan cara penyelesaian pemerintah daerah dalam menjalankan E-Government.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Berikut peneliti deskripsikan beberapa penelitian terkait dengan Judul *Penerapan E-Government Sebagai Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Tegal*, untuk itu penelitian ini menunjuk dan menghadapkan peneliti yang lain, berikut peneliti paparkan :

1. Joko Tri Nugraha, *E-Government dan Pelayanan Publik (Studi Tentang Elemen Sukses Pengembangan E-Government di Pemerintah Kabupaten Sleman)*, Universitas Tidar, Jurnal Komunikasi dan Kajian Media , Vol 2 No.1 April 2018.<sup>6</sup> Positioning dengan penelitian saya adalah pemerintahan Kota Tegal tidak hanya memanfaatkan teknologi informasi, akan tetapi komunikasi secara optimal seperti penyajian informasi yang lengkap menjadi hal utama dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sehingga bisa mempengaruhi penerapan E-Government di Kota Tegal.

---

<sup>6</sup> Joko Tri Nugraha, "E-Government dan Pelayanan Publik (Studi Tentang Elemen Sukses Pengembangan E-Government di Pemerintah Kabupaten Sleman)", Jurnal Komunikasi dan Kajian Media, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2018

2. Mohammad Toha Putra, *Evaluasi Partisipasi Masyarakat Dalam E-Government Pelayanan Publik di Kabupaten Boyolali*, Universitas Diponegoro, Journal of Politic and Government Studies , Vol 66 No 4 Agustus 2017.<sup>7</sup> Positioning dengan penelitian ini adalah Partisipasi masyarakat tidak dilihat dari inovasi pemerintah terhadap pelayanan publik tetapi tingkat partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tegal sehingga dapat mempengaruhi penerapan E-Government.
3. Achamad Habibullah, *Kajian Pemanfaatan dan Pengembangan E-Government*, Universitas Jember, Jurnal Ilmu Administrasi Negara ,Vol 23 No.3 Hal 187-195 2010.<sup>8</sup> Possisioning dengan penelitian ini adalah Penerapan E-Government yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Tegal.

#### **F. Metode Penelitian**

Salah satu proses yang harus dilakukan pada saat melakukan penelitian adalah Metode penelitian. Penelitian sendiri berarti segala usaha untuk mencari pengetahuan baru menurut prosedur yang sistematis dan terkendali melalui data empiris yang artinya dapat diuji berkali - kali dengan hasil yang sama.<sup>9</sup> Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian berjudul *Penerapan E-Government Sebagai Upaya Peningkatan*

---

<sup>7</sup> Mohammad Toha Putra, "Evaluasi Partisipasi Masyarakat Dalam E-Government Pelayanan Publik di Kabupaten Boyolali", Jurnal of Politic and Government Studies, Volume 66 Nomor 4 Tahun 2017.

<sup>8</sup> Achamad Habibullah , " Kajian Pemanfaatan dan Pengembangan E-Government" Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 23 Nomor 33 Tahun 2010.

<sup>9</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta, Granit, 2010, hlm.2.

*Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Tegal* adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menganalisa kualitas dari pengaruh sosial yang tidak dapat diketahui melalui pendekatan kuantitatif.<sup>10</sup>

#### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian berjudul *Penerapan E-Government Sebagai Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Tegal* adalah Penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris berarti tata cara yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan terlebih dahulu meneliti data sekunder setelah itu melaksanakan penelitian terhadap data primer di lapangan.<sup>11</sup>

#### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipakai dalam penelitian ini merupakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonseptualisasikan hukum sebagai sistem pranata sosial yang nyata dan fungsional dalam suatu sistem kehidupan yang nyata.<sup>12</sup> Disini berarti menitikberatkan penelitian dengan tujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris melalui terjun langsung ke Pemerintah Daerah di Kota Tegal.

---

<sup>10</sup> Saryono, "Metode Penelitian Kualitatif, Bandung, PT Alfabeta, 2010, hlm.1.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers, 1985, hlm.52.

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Pers, 1986, hlm.51.

### 3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber dari sumber pertama terkait dengan permasalahan yang dibahas.<sup>13</sup> Sumber data primer diperoleh peneliti melalui pengamatan atau observasi langsung yang didukung dengan wawancara terhadap informan. Dalam sumber data primer peneliti akan melakukan pengamatan atau observasi di Pemerintah Daerah Kota Tegal agar peneliti lebih jelas dalam melihat penerapan E-Government secara langsung akan melakukan wawancara kepada kepala dan pegawai dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Tegal khususnya bidang IT (teknologi) dan masyarakat di wilayah Kota Tegal agar peneliti lebih mengetahui bagaimana tingkat partisipasi masyarakat menerapkan E-Government dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Tegal.

Kemudian peneliti menggunakan bahan hukum primer yaitu Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government,

---

<sup>13</sup> Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada , 2006, hlm.30.

Peraturan Pemerintah Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

- b. Data Sekunder sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data – data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku – buku ilmiah , hasil penelitian dan sebagainya.<sup>14</sup>

Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder yaitu Buku yang berkaitan dengan judul peneliti, Jurnal yang berkaitan dengan judul peneliti, karya ilmiah perorangan yang berkaitan dengan judul peneliti, internet, artikel dan surat kabar yang berkaitan dengan topik peneliti yaitu mengetahui Penerapan E-Government Sebagai Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Tegal.

#### 4. Metode Pengumpulan data

##### a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini untuk mencari teori, pendapat, ataupun penemuan yang berkaitan dengan pokok permasalahan, berupa : Peraturan Perundangan, Karya Ilmiah para sarjana, dan lain – lain sumber. Teknik pengumpulan data peneliti menggunakan Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government , Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan

---

<sup>14</sup> Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta, PT. Hanindita Offset, 1983, Hlm. 56.



Pemerintah Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

b. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang di wawancarai, wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.<sup>15</sup> Dengan wawancara diharapkan peneliti memperoleh gambaran mengenai penerapan *E-Government* di pemerintah daerah Kota Tegal. Teknik pengumpulan data penulis akan wawancara dengan pegawai pemerintah daerah Kota Tegal mengenai penerapan *E-Government* , hambatan pemerintah daerah, dan cara penyelesaian pemerintah daerah dalam menerapkan *E-Government* di Kota Tegal.

5. Metode Analisis data

Pengertian analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data , memilah – milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>16</sup> Dalam metode analisis data peneliti mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil wawancara di pemerintah daerah Kota Tegal dan

---

<sup>15</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, "Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri," Jakarta, Ghalia Indonesia, 1997, hlm.57.

<sup>16</sup> Lexy J Moleong, "Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi." Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2013, hlm. 248.

hasil kuisioner masyarakat di wilayah Kota Tegal kemudian menganalisa sehingga dapat ditarik kesimpulan dari seluruh hasil dan pembahasan skripsi oleh peneliti.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Rencana penelitian ini akan disusun dalam 4 bagian bab tahapan dalam penulisan, yaitu :

Bab I Pendahuluan, Bab ini merupakan pengembangan dari proposal memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, rencana sistematika penulisan, jadwal penelitian, dan daftar pustaka. Sistematika penulisan yang menjadi acuan dalam penulisan skripsi ini. Bab ini merupakan pengantar pada inti pembahasan.

Bab II Tinjauan Konseptual, Bab ini meninjau tentang pengertian, manfaat, konsep E-Government, tugas pemerintah daerah Kota Tegal terkait E-Government, indikator dalam penerapan *E-Government*.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, Bab ini berupa uraian rumusan masalah tentang penerapan E-Government di Kota Tegal, Tingkat Partisipasi masyarakat dan hambatan pemerintah daerah dalam menerapkan *E-Government* di Kota Tegal.

Bab IV Penutup, menguraikan tentang kesimpulan dan saran dari penelitian ini.

## **BAB II**

### **TINJAUAN KONSEPTUAL**

#### **A. Tinjauan Historis Otonomi Daerah Di Indonesia**

Perkembangan peraturan tentang otonomi daerah di Indonesia selalu mengalami perubahan dalam rangka penerapan prinsip otonomi daerah, secara formal sudah berlangsung sejak tanggal 18 Agustus 1945 ketika di sahkannya UUD NRI 45 pada masa awal kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Masa pengaturan sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, Penjajahan Belanda maupun Jepang mempengaruhi pengaturan saat awal diselenggarakannya pemerintahan Republik Indonesia oleh karena itu perlu kita cermati sebagai tinjauan sejarah otonomi daerah dari sebelum kemerdekaan dan setelah merdeka seperti yang terurai dibawah ini.<sup>17</sup>

##### **1. Masa Penjajahan Belanda**

Seperti yang di ketahui dalam sejarah Indonesia sebelum di jajah Belanda, di Jawa berlangsung masa “Pemerintahan” Kerajaan Mataram, Pada masa pemerintahan Mataram sudah dikenal “Pekerjaan” dalam satu daerah di sebut “Bupati” yang kemudian pada masa Hindia Belanda, nama “Bupati” diresmikan sebagai nama jabatan Pimpinan Kabupaten.<sup>18</sup> Masa “Pemerintahan” Hindia Belanda *Staten General* di Negara Belanda Nederlan di beri kekuasaan untuk

---

<sup>17</sup>Santoso M Agus,”Otonomi Daerah Di Negara Kesatuan Republik Indonesia”, Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 6, No. 4, 2017.

<sup>18</sup>H.J de Grad. “Awal Kebangkitan Mataram, Masa Pemerintahan Senopati (*De Regering Van Pemerintahan Senopati Ingalaga*)”, Jakarta , Pustaka Grafiti Pers,1985,hlm.99.

mengatur urusan-urusan di wilayah “Hindia Belanda” (yang kemudian menjadi wilayah Republik Indonesia) akan tetapi badan ini belum juga memikirkan untuk mengadakan pembahasan susunan pemerintahan/Desentralisasi semacam UUD bagi “Hindia Belanda” (Wilayah Indonesia) yang disebut *Regeerings Reglement/RR* yang di dalamnya terlihat sistem “*Sentralistis*”, namun terdapat ketentuan Pokok dari pemerintahan dalam negeri Hindia Belanda (Wilayah Indonesia) menyebutkan Kabupaten-Kabupaten di Jawa dan Madura, jika di pandang perlu oleh Gubernur Jenderal, di bagi dalam distrik-distrik. Hal itu menunjukkan dan membuktikan adanya “struktur Pemerintahan di Indonesia yang asli”, sejak sebelum kedatangan Belanda.<sup>19</sup>

Ketentuan *Regeerings Reglement* (RR) kemudian di ganti menjadi *Indishe Siaatsregeling* (IS), dengan ketentuan yang sama dengan mengadakan perubahan walaupun tambahan yang menjadi landasan adanya Desentralisasi, kemudian setelah adanya pergeseran dari paradigma pemerintahan “*sentralisasi*” ke “*desentralisasi*”, seluruh wilayah Hindia Belanda dibagi dalam lingkungan kerja yang disebut wilayah (*gewest*), untuk kepentingan penyelenggaraan (*algemeen bestuur*); *Gewest* (wilayah) merupakan kesatuan geografis tanpa

---

<sup>19</sup>Surianingrat, Bayu, “*Sejarah Pemerintahan di Indonesia (Babak Hindia Belanda dan Jepang)*”, Jakarta, Dewaruci Press, 1981, hlm.3.

perangkat sendiri dan tanpa keuangan sendiri, jadi pemerintahan dilaksanakan secara *sentralistis ekstrim*, jalurnya hanya dekonsentrasi.<sup>20</sup>

Kemudian di Jawa dan Madura diberlakukan *Bestuurs hervormings wet* (UU penyesuaian pemerintahan), yang berupa suatu Undang-Undang yang bermaksud menyesuaikan “pemerintah wilayah” dengan berlakunya Undang-Undang desentralisasi bermaksud membentuk “Dewan Lokal” yang mempunyai “otonomi”, kemudian di bentuklah Provinsi (*Province*), Kabupaten (*Regentschap*) dan Kotamadya / kota (*stads/genente*) dan *hurnine*, di Jawa dan Madura di bagi dalam 3 (tiga) provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dan 2 (dua) Gubernemen terdiri dari Surakarta dan Yogyakarta.<sup>21</sup> Mengenai penyelenggaraan sistem desentralisasi pada masa pemerintahan Hindia Belanda, dilaksanakan 1905, selanjutnya mulai tahun 1938 terdapat 3 (tiga) wilayah gubememen Sumatera, Kalimantan (*Borneo*) dan Timur Besar (*Groote Oost*),<sup>22</sup> tiap gubernemen di kepalai oleh seorang gubernur yang bertugas melaksanakan urusan Pemerintah Hindia Belanda dan Departemen-Departemen Gubemur melaksanakan pengawasan atas pemerintah otonomi dan swapraja-swapraja gewesten lama tetap pengawasan wilayah administrative; yaitu kesatuan-kesatuan Pemerintahan dengan sebutan karesidenan yang dikepalai oleh seorang Residen yang

---

<sup>20</sup>Ibid. hlm : 51

<sup>21</sup>Ibid. hlm : 54

<sup>22</sup>Hadjon, Philipus.M, ”Pengantar Hukum Administrasi Indonesia”, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 1993, hlm. 12.

tugasnya mengurus jalan, jembatan, bangunan, pekerjaan umum, pengairan, kesehatan rakyat, pemerataan pertanian pendidikan (pribumi) peternakan (pemberantasan penyakit).<sup>23</sup>

Pada daerah kotamadya/kota dengan kabupaten yaitu tingkatannya sama, begitu juga dengan otonominya, jenis pemerintahan yang merupakan Daerah Otonomi, diluar Jawa Madura (luar Jawa) langsung di perintah oleh gubernemen, secara ketatanegaraan berada pada tahap/ tataran antara *provincie* dan kabupaten (di pulau Jawa setingkat keresidenan) yang mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri.<sup>24</sup>

Berdasarkan uraian diatas mengenai sistem pemerintahan Indonesia masa penjajahan Belanda dengan corak sentralisistis, sehingga semua urusan pusat/pemerintahan Hindia Belanda kepada Gubernur Jenderal, kemudian mulai ada desentralisasi terbatas, yang mulanya diawali dengan adanya desentralisasi urusan terbatas dan bersifat lokal yaitu dengan pembentukan wilayah administratif, keresidenan, kabupaten, dan kota di Jawa serta satuan wilayah dan masyarakat di luar Jawa.

## **2. Masa Penjajahan Jepang**

Sebagaimana diketahui, setelah ratusan tahun Belanda berkuasa di Indonesia, kemudian diambil alih oleh Penjajah Jepang yang berkuasa di Indonesia selama 3,5 (tiga setengah) tahun, dengan melakukan perubahanperubahan yang cukup fundamental, dengan

---

<sup>23</sup>Ibid.

<sup>24</sup>Surianingrat,Bayu, op. cit. hlm.63.

membagi dalam 3 (tiga) wilayah “militer”, yaitu Sumatera dan Jawa Madura sebagai wilayah angkatan darat, pemerintahan melakukan penetrasi kedalam kehidupan masyarakat jauh lebih intensif dibandingkan dengan pemerintahan Hindia Belanda.<sup>25</sup>

Masa penjajahan Jepang, pemerintahan yang di bentuk adalah “Pemerintahan Militer”, yang melaksanakan pemerintahan di Indonesia, dengan penyelenggaraan yang sesuai dengan kepentingan angkatan perang Jepang yang bersangkutan, dengan melanjutkan pemerintahan yang telah ada, yaitu pemerintahan dari masa Hindia Belanda. Pemegang kekuasaan pemerintahan militer tertinggi adalah *Dai Nippon* yang juga memegang kekuasaan yang dahulu ada ditangan Gubernur Jenderal, dengan sistem pemerintahanmenghapus jalur dekonsentrasi.<sup>26</sup>

Pimpinan Bala Tentara Jepang memerintah Indonesia pada masa penjajahan Jepang sebagai pemerintah pusat yang dikuasai Angkatan Darat dan Angkatan Laut, sedangkan pemerintah Daerah tetap diserahkan Kenco / Bupati dan Si-Co/Walikota, semuanya berada dibawah Syuucokan/Residen (orang Jepang), susunan Pemerintah di Daerah diatur dalam Osamu Seirei No. 27 tahun 1942.

---

<sup>25</sup>Hassan,Syaukani Rais ,et al, ”Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan (PUSKAB)”, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2002, hlm.55.

<sup>26</sup>Soetoprawiro, Koerniatmanto, ”*Pemerintahan dan Peradilan di Indonesia (Asal usul dan perkembangannya)*”, Bandung, PT. Citra Aditiya Bakti, 1994,hlm.22.

### **3. Masa Kemerdekaan Republik Indonesia**

PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia berdiri sebelum dikumandangkannya proklamasi, yang telah terbentuk sebagai Lembaga Kebangsaan Indonesia pada tanggal 9 Agustus 1945 oleh tokoh-tokoh Bangsa Indonesia, dan sejak tanggal 15 Agustus 1945 yang dipimpin oleh Soekarno-Hatta, Kemudian Menurut kaidah yang belaku terbentuk setelah pengucapan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia oleh Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945 dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945, dan sejak saat itu dalam menjalankan pemerintahan Negara Republik Indonesia harus berpijak pada UUD 1945, sebagai konstitusi tertinggi di negara Republik Indonesia.

Perkembangan kebijakan dan landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah, hal-hal yang berkaitan dengan prinsip dan sistem pembagian urusan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dalam rangka penerapan asas desentralisasi di Indonesia, tertuang dalam Pasal 18 UUD 1945 sebelum perubahan yang berbunyi : “Pembagian daerah Indonesia atas dasar besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara dan hak-hak asal usul dalam daerah yang bersifat istimewa.”



Bahwa dari isi dan jiwa Pasal 18 UUD 1945 beserta penjelasannya, menurut Solly Lubis : “Jelaslah bahwa pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan politik “Desentralisasi” dan Dekonsentrasi dibidang ketatanegaraan”, sebenarnya pasal tersebut lebih banyak mengandung ketentuan tentang penyelenggaraan pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah.<sup>27</sup>

Indonesia merupakan Negara kesatuan, yang terbentuk sejak tanggal 18 Agustus 1945, tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik”. Dan pada penjelasannya menetapkan bentuk Negara kesatuan dan Republik mengandung isi pokok pemikiran kedaulatan rakyat, juga dalam Pancasila tertuang jelas pada sila ketiga yang berbunyi : “Persatuan Indonesia”. Artinya bahwa bentuk Negara Kesatuan Indonesia telah dinyatakan secara bulat dan konsitusional tertuang dalam dasar Negara Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, diharapkan dapat menyatukan seluruh wilayah Nusantara yang luas dan terbagi kepulauan-kepulauan dan suku bangsa. Prinsip “Negara Kesatuan” Republik Indonesia tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945, yang tetap tidak berubah sampai sekarang, walaupun UUD 1945 telah mengalami perubahan/amandemen ke 4 (empat) kalinya, tetap berisi ketentuan bahwa “Indonesia (Republik Indonesia) adalah Negara

---

<sup>27</sup>Lubis,M.Solly, ”*Pembahasan UUD 1945*”,Bandung, Alumni, 1979, hlm.215.

Kesatuan yang berbentuk Republik”; mempunyai makna Negara tunggal (satu Negara) yang monosentris (berpusat satu) terdiri hanya satu Negara, satu pemerintahan, satu kepala Negara, satu badan legislatif yang berlaku bagi seluruh daerah di wilayah Negara bersangkutan, dalam melakukan aktifitas keluar maupun kedalam diurus oleh satu pemerintahan yang merupakan langkah kesatuan, baik pemerintah pusat maupun daerah.<sup>28</sup>

Karena luasnya wilayah Republik Indonesia, dan terbagi dalam bentuk kepulauan serta daerah-daerah dalam menjalankan pemerintahan, maka prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak bisa dipisahkan dengan prinsip Desentralisasi atau otonomi daerah yang didasarkan pada Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan. Yang berbunyi : “Pembagian Daerah Indonesia atas dasar besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan menghayati dasar pemusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara dan hak-hak asal usul dalam daerah yang bersifat istimewa”.

Prinsip Desentralisasi atau otonomi Daerah yang tertuang dalam Pasal 18 UUD 1945, untuk lebih mendalami maksudnya, lebih tegas dituangkan dalam penjelasannya, yang berbunyi: (1) Oleh karena Negara Indonesia itu suatu "*eenheidstaat*", maka Indonesia tak akan mempunyai daerah di dalam lingkungan yang bersifat *staat* juga

---

<sup>28</sup>Sudjiono, Budi dan Dedy Rudianto, “Manajemen Pemerintahan Federal Perspektif Indonesia Masa Depan”, Jakarta, Citra Indah Pratama, 2003, hlm. 1.

Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Di daerah-daerah yang bersifat otonomi (*streek* dan *locale rechts gemenschappen*) atau daerah bersifat administrasi belaka, semua menurut aturan yang akan ditetapkan dengan Undang-Undang. Kemudian mengenai otonomi Daerah ini dikuatkan dan diuraikan lagi secara rinci dalam amandemen UUD 1945, berkaitan dengan prinsip Negara Kesatuan dan prinsip Otonomi Daerah yang tidak bisa dipisahkan antara Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 18 UUD 1945 baik sebelum maupun sesudah amandemen, maka dapat disimpulkan antara lain “Dalam rangka Negara kesatuan Republik Indonesia dan memperhatikan tujuan pemberian otonomi kepada Daerah, maka penyelenggaraan otonomi daerah oleh pemerintah daerah merupakan sub sistem dari sistem pemerintahan Negara, khususnya pemerintahan eksekutif diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah sampai pemerintah desa.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (1), menyatakan dengan tegas bahwa Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Prinsip pada Negara Kesatuan ialah pemegang tampuk kekuasaan tertinggi atas segenap urusan negara ialah Pemerintah Pusat tanpa adanya suatu delegasi atau pelimpahan kekuasaan kepada Pemerintah Daerah (*local government*).<sup>29</sup> Negara

---

<sup>29</sup> Lubis, M. Solly, op cit. hlm. 8.

Kesatuan merupakan landasan batas dari isi pengertian otonomi. Berdasarkan landasan batas tersebut dikembangkan berbagai peraturan (*rules*) yang mengatur mekanisme yang akan menjelmakan keseimbangan antara tuntutan kesatuan dan tuntutan otonomi. Di sini pulalah letak kemungkinan *spanning* yang timbul dari kondisi tarik menarik antara kedua kecenderungan tersebut.<sup>30</sup>

Perkembangan otonomi daerah di Indonesia mengalami pasang surut dengan corak yang berbeda-beda, tentunya dilandasi dengan peraturan perundang-undangan yang coraknya berbeda-beda pula, oleh karena itu, lahirnya undang-undang yang mendasari Otonomi Daerah itu dilatar belakangi oleh kondisi politik hukum yang berkembang pada saat itu. Berikut ini akan diuraikan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan Otonomi Daerah sejak tahun 1945.

#### **1) Masa berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah**

Undang-Undang ini menekankan pada aspek cita-cita kedaulatan rakyat melalui pengaturan pembentukan Badan Perwakilan Rakyat Daerah. Didalam Undang-Undang ini ditentukan 3 (tiga) jenis Daerah Otonomi, yaitu Keresidenan, Kabupaten dan Kota. Otonomi Daerah diberikan kepada daerah bersamaan pada saat pembentukan daerah melalui Undang - Undang berupa kewenangan pangkal yang sangat terbatas dan selama kurun waktu

---

<sup>30</sup>Manan,Bagir, "Perjalanan Historis Pasal 8 UUD 1945", Jakarta, UNISKA,1993,hlm.3.

3 (tiga) tahun belum ada Peraturan Pemerintah yang mengaturnya. Undang-Undang ini belum bisa dilaksanakan sepenuhnya.

**2) Masa berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah**

Undang-undang ini hanya berfokus pada pengaturan tentang susunan pemerintahan daerah yang demokrasi. Di dalam Undang-Undang ini ditentukan 2 (dua) jenis daerah otonom, yaitu daerah otonomi biasa dan daerah otonomi istimewa serta ada 3 (tiga) tingkatan daerah otonom, yaitu Propinsi, Kabupaten/Kota Besar dan Desa/Kota Kecil. Undang-Undang ini juga belum bisa dilaksanakan sepenuhnya.

**3) Masa berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah**

Undang-Undang ini berlaku secara seragam di seluruh Indonesia, titik beratnya adalah pengaturan pada aspek otonomi yang seluas-luasnya Di dalam Undang-Undang ini di tetapkan ada 3 (tiga) tingkatan daerah otonomi yaitu Daerah Tingkat I termasuk Kota Praja Jakarta Raya, Daerah Tingkat II dan Daerah Tingkat III.

Dalam pada ini pelaksanaan Otonomi Daerah semakin mendapat perhatian Pemerintah Pusat, di mana Pemerintah Pusat diwajibkan melaksanakan politik desentralisasi di samping dekonsentrasi. Namun demikian Otonomi Daerah saat berlakunya Undang-Undang ini juga belum bisa dilaksanakn sepenuhnya, bahkan nuansa sentralisasi masih sangat kelihatan.

#### **4) Masa berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah**

Undang - Undang ini sudah menganut sistem Otonomi yang seluas-luasnya; pembagian daerah otonom sebanyak 3 (tiga) tingkatan, yaitu Propinsi sebagai Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya sebagai Daerah Tingkat II dan Kecamatan/Kota Praja sebagai Daerah Tingkat III. Walaupun Undang-Undang ini menganut sistem otonomi yang seluas-luasnya tetapi tidak ada satupun Peraturan Pemerintah (PP) yang diterbitkan dalam rangka penyerahan sebagian urusan pemerintahan (Desentralisasi) kepada daerah, oleh karena itu Undang-Undang ini juga belum bisa dilaksanakan sepenuhnya.

Kemudian Undang-Undang ini dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1969. Dengan Ketentuan bahwa pernyataan tidak berlakunya Undang-Undang ini pada saat ditetapkannya Undang-Undang yang menggantikannya.

#### **5) Masa berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pemerintahan Daerah**

Dalam Undang-Undang ini azas Desentralisasi dilaksanakan bersamaan dengan azas Dekonsentrasi dan *medebewind*, melalui penyerahan urusan secara bertahap sesuai dengan kemampuan (kewenangan daerah otonom terbatas) dan semuanya tergantung kebijakan Pemerintah Pusat yang bersifat seragam.

Dalam mengelola sumber daya alam (SDA) sepenuhnya menjadi wewenang Pemerintah Pusat, tidak ada kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah, termasuk rekruting Pejabat Politik, Proses Legislasi daerah melalui izin dan petunjuk Pemerintah Pusat. Yang memegang kepemimpinan dalam pemerintahan daerah adalah Kepala Daerah dan DPRD, kedudukan Gubernur sebagai Kepala Daerah merupakan Kepala Pemerintahan, sekaligus kepala wilayah bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri dalam negeri, sedangkan kedudukan DPRD sebagai unsur Pemerintahan Daerah dan juga berfungsi sebagai wakil rakyat. Maka kedudukan Gubernur sebagai Kepala Daerah sangat dominan. Undang-Undang ini mengenal adanya perangkat Dekonsentrasi di daerah Tingkat I dan Tingkat II, dimana kewenangan Kabupaten dan Kota bersifat *residule*, dan tidak mengenal adanya otonomi desa.

**6) Masa berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah**

Pada Undang-Undang ini azas Desentralisai di laksanakan di Kabupaten dan Kota, sedangkan Desentralisasi dilaksanakan bersama-sama di Provinsi dalam kedudukannya sebagai Daerah Otonomi terbatas sekaligus wilayah administrasi.

Desentralisasi ditetapkan bersamaan penetapan status daerah otonomi/melekat (kewenangan daerah otonomi utuh dan bulat),

bersifat mandiri dan bervariasi sesuai aspirasi masyarakat lokal, sumber daya alam di daerahnya masing - masing.

Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom sebagai badan eksekutif daerah, sedangkan DPRD sebagai Badan legislatif daerah, termasuk menjalankan pemilihan Kepala Daerah menjadi kewenangan DPRD. Maka kedudukan DPRD pada saat itu sangat kuat.

Kepala Daerah dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada DPRD dan wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada DPRD setiap tahun anggaran, apabila pertanggungjawaban Kepala Daerah ditolak yang ke dua kalinya, maka DPRD sewaktu-waktu dapat mengusulkan pemberhentiannya kepada Presiden RI.

#### **7) Masa berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah**

Dalam Undang-Undang ini Azas Desentralisasi di laksanakan di Propinsi dan Kabupaten/Kota, sedangkan Dekonsentrasi hanya di laksanakan di Propinsi. Pada periode ini hampir mirip seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 yaitu menempatkan DPRD sebagai bagian Pemerintahan Daerah bersama-sama Kepala Daerah, menjalankan Pemerintahan Daerah (DPRD merupakan bagian dari Pemerintahan Daerah). Kepala Daerah tidak lagi bertanggungjawab



kepada DPRD tetapi bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.

Undang-Undang ini sudah mengatur tentang Pemilihan Kepala Daerah Langsung oleh rakyat, sehingga demokrasi ada pada rakyat, dan agak istimewanya adalah mengenal adanya otonomi desa.

## **B. Tinjauan Tentang Penerapan *E-Government***

### **1. Pengertian *E-Government***

Dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi terbentuk sebuah sistem manajemen dan aktivitas kerja di lingkungan pemerintahan. *e-government* atau electronic government merupakan suatu upaya untuk mempublikasikan bentuk pemerintahan yang berbasis elektronik.

E-Government juga dapat dipahami sebagai penggunaan teknologi berdasarkan *WEB* (jaringan), komunikasi internet, dan dalam kasus tertentu merupakan aplikasi interkoneksi untuk memfasilitasi komunikasi dan memperluas akses ke dan atau dari pemberian layanan dan informasi pemerintah kepada penduduk, dunia usaha, pencari kerja, dan pemerintah lain, baik instansional maupun antar negara.<sup>31</sup>

Selain itu, kombinasi antara buah pemikiran *New Public Management* (NPM) dengan pemanfaatan teknologi informasi yang

---

<sup>31</sup> Achamad Habibullah, “Kajian Pemanfaatan dan Pengembangan E-Government” Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 23 Nomor 3 Tahun 2010. ([http://journal.unair.ac.id/filerPDF/03\\_Habib%20JMKB\\_edited%20moor%20%28Tyas%29.pdf](http://journal.unair.ac.id/filerPDF/03_Habib%20JMKB_edited%20moor%20%28Tyas%29.pdf))

nampak di dalam fenomena administrasi melalui internet ini telah melahirkan konsep aplikasi pemerintahan digital atau yang lebih populer disebut sebagai *Electronic Government*. Bank Dunia (*World Bank*) mendefinisikan *e- Government* sebagai berikut: “*e-Government* mengarahkan untuk penggunaan IT oleh semua agen pemerintahan (seperti WAN, internet, *mobile computing*) yang mempunyai kemampuan untuk mengubah hubungan dengan masyarakat, bisnis dan pihak yang terkait dengan pemerintahan.

Di sisi lain, UNDP (*United Nation Development Programme*) mendefinisikan *e-Government* secara lebih sederhana, yaitu: “*e-Government* adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (*ICT-Information and Communication Technology*) oleh pihak pemerintahan.

Sementara itu, vendor perangkat lunak terkemuka, SAP memiliki definisi yang cukup unik, yaitu: “*e-Government* adalah sebuah perubahan yang global untuk mempromosikan penggunaan internet oleh pihak yang terkait dengannya. Janet Caldw, Direktur Institute for *Electronic Government* (IBM Corporation) dari hasil kajiannya bersama Kennedy School of Government, Harvard University, memberikan sebuah definisi yang menarik, yaitu: “*Electronic Government* bukanlah sebuah perubahan fundamental yang berjangka pendek pada pemerintahan dan hal itu kita dapat menyaksikan pada permulaan era industrialisasi. Sedangkan definisi

formal dari pemerintah Republik Indonesia, sebagaimana diatur oleh Kementerian Komunikasi dan informatika (Keminfo) adalah pelayanan publik yang diselenggarakan melalui situs pemerintah dimana domain yang digunakan juga menunjukkan domain Pemerintah Indonesia yakni go.id. Sehingga berdasarkan definisi formal ini, walaupun ada website yang secara real dikelola oleh pemerintah dan digunakan untuk pelayanan publik namun apabila tidak ber-domain go.id maka tidak masuk klasifikasi *e-Government*.

Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government* menjelaskan bahwa pengembangan *e-Government* merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan *e-Government* dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalisasikan pemanfaatan teknologi informasi.

## **2. Manfaat *E-Government***

Negara amerika merupakan salah satu negara besar yang mengimplementasikan konsep *e-government*, manfaat penerapan *e-government* di suatu negara dijelaskan oleh Al Gore dan Tony Blair, antara lain :

- a. Memperbaiki kualitas mesyarakat pemerintah kepada para stakeholder-nya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam kinerja efektifitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan dan bernegara.
- b. Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah dalam rangka penerapan konsep *Good Corporate Government*.
- c. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholder-nya untuk kepentingan sehari-hari.
- d. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan tren yang ada dan sebagiannya.<sup>32</sup>

### 3. Tahapan Pengembangan *E-Government*

Di dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government* di jelaskan bahwa penerapan *e-Government* di setiap lembaga pemerintah mengacu kepada pentahapan pengembangan *e-Government* secara nasional, dan disesuaikan dengan kondisi yang ada di setiap lembaga pemerintah yang mencakup Prioritas layanan elektronik yang akan diberikan. Kondisi infrastruktur informasi yang

---

<sup>32</sup> Indrajit, Richardus Ekodkk,"Membangun Aplikasi E-Government",Jakarta:PT.Elek Media Komputindo,2002.hlm.5.

dimiliki, Kondisi kegiatan layanan saat ini, Kondisi anggaran dan sumber daya manusia yang dimiliki.

Jangka waktu penerapan *e-Government* di setiap lembaga pemerintah bervariasi sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi tetap dalam kerangka rencana penerapan *e-Government* secara nasional. Pentahapan dalam penerapan *e-Government* di setiap lembaga pemerintah mengikuti :

**a. Tingkat persiapan,** antara lain :

1. Pembuatan situs web pemerintah di setiap lembaga;
2. Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia menuju penerapan *e-Government*;
3. Penyediaan sarana akses publik antara lain dalam bentuk *Multipurpose Community Center* (MCC), Warung dan Kios Internet, dan lain-lain;
4. Sosialisasi keberadaan layanan informasi elektronik, baik untuk publik maupun penggunaan internal;
5. Pengembangan motivasi kepemimpinan (*eleadership*) dan kesadaran akan pentingnya manfaat *e-Government* (*awarness building*);
6. Penyiapan peraturan pendukung.

**b. Tingkat Pematangan,** antara lain :

1. Pembuatan situs informasi layanan publik interaktif, antara lain dengan menambahkan fasilitas mesin pencari (*search engine*),

fasilitas tanya jawab dan lain-lain : Pembuatan hubungan dengan situs informasi lembaga lainnya (*hyperlink*).

**c. Tingkat Pemantapan,** antara lain :

1. Penyediaan fasilitas transaksi secara elektronik antara lain dengan menambahkan fasilitas penyerahan formulir, fasilitas pembayaran dan lain-lain.
2. Penyatuan penggunaan aplikasi dan data dengan lembaga lain (*interoperabilitas*).

**d. Tingkat Pemanfaatan,** antara lain :

1. Pembuatan berbagai aplikasi untuk pelayanan G2G (*Government to Government*), G2B (*Government to Bussines*) dan G2C (*Government to Community*) yang terintegrasi.
2. Pengembangan proses layanan *e-Government* yang efektif dan efisien.
3. Penyempurnaan menuju kualitas layanan terbaik (*best practice*).

**4. Tujuan Pengembangan *E-Government***

Dalam Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan *e-government*, Pengembangan *e-government* merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien.

Terdapat empat tujuan yang dibuat untuk menjalankan pengembangan *e government*, yaitu:

- a Terbentuknya sebuah jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang berkualitas, dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, dapat dijangkau disetiap masyarakat dan wilayah di seluruh Indonesia.
- b Meningkatkan perkembangan perekonomian, mempertahankan stabilitas ekonomi, dan dapat bersaing dengan perdagangan internasional melalui hubungan interaktif dengan dunia usaha.
- c Terbentuknya mekanisme dan pola komunikasi dengan lembaga-lembaga negara dan menyediakan fasilitas-fasilitas seperti dialog publik dengan masyarakat sehingga ikut berpartisipasi dalam perumusan kebijakan negara.
- d Terbentuknya proses kerja dan sistem manajemen yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah dan pemerintah daerah otonom.

## **5. Strategi Pengembangan *E-Government***

Didalam Instruksi Presiden No.3 Tahun 2003 dijelaskan juga mengenai Strategi Pengembangan E-Government dengan mempertimbangkan kondisi saat ini. Pencapaian strategis *e-government* perlu dilaksanakan melalui enam strategi yang berkaitan erat, yaitu:

- a. Mengembangkan sistem pelayanan yang andal dan terpercaya, serta terjangkau oleh masyarakat luas.
- b. Menata sistem manajemen dan proses kerja pemerintah dan pemerintah daerah otonom secara holistic.

- c. Memanfaatkan teknologi serta dunia usaha mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi.
- d. Meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industry telekomunikasi dan teknologi informasi.
- e. Mengembangkan kapasitas SDM baik pada pemerintah maupun pemerintah daerah otonom disertai dengan meningkatkannya e-literacy masyarakat.
- f. Melaksanakan pengembangan secara sistematis melalui tahapan-tahapan yang realistis dan terukur.

## **6. Konsep *E-Government***

Konsep sistem administrasi pemerintahan yang efisien ini disebut E-Government. Hal ini merupakan aspirasi dari masyarakat yang menginginkan untuk tata kelola pemerintah yang baik dan pelayanan yang terpadu. Dengan adanya E-Government diharapkan meningkatnya efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

## **7. Klasifikasi *E-Government***

Tipe relasi dalam *E-Government* dapat dibedakan dalam empat tipe sebagai berikut :

### ***a. Government to Citizens (G-to-C)***

Tipe G-to-C ini merupakan aplikasi *E-Government* yang paling umum, yaitu dimana pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portofolio teknologi informasi dengan tujuan utama untuk memperbaiki



hubungan interaksi dengan masyarakat. Dengan kata lain tujuan utama untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat (rakyat). Dengan kata lain, tujuan utama dari dibangunnya aplikasi *E-Government* bertipe G-to-C adalah untuk mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya melalui kanal-kanal akses yang beragam agar masyarakat dapat dengan mudah menjangkau pemerintahnya untuk pemenuhan berbagai kebutuhan pelayanan sehari-hari.

***b. Government to Business (G-to-B)***

Salah satu tugas utama dari sebuah pemerintahan adalah membentuk sebuah lingkungan bisnis yang kondusif agar roda perekonomian sebuah negara dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dalam melakukan aktifitas sehari-hari, entity bisnis semacam perusahaan swasta membutuhkan banyak sekali data dan informasi yang dimiliki oleh pemerintah. Disamping itu, yang bersangkutan juga harus berinteraksi dengan berbagai lembaga kenegaraan karena berkaitan dengan hak dan kewajiban organisasinya sebagai sebuah entity berorientasi profit. Diperlukannya relasi yang baik antara pemerintah dengan kalangan bisnis tidak saja bertujuan untuk memperlancar praktik bisnis dalam menjalankan roda perusahaannya, namun lebih jauh lagi banyak hal yang dapat menguntungkan pemerintah jika terjadi relasi interaksi yang baik dan efektif dengan industri swasta.

***c. Government to Governments (G-to-G)***

Era globalisasi ini terlihat jelas adanya kebutuhan di negara-negara untuk saling berkomunikasi secara lebih intens dari hari ke hari. Kebutuhan untuk berinteraksi antar suatu pemerintah dengan pemerintah setiap harinya tidak hanya berkisar pada hal-hal yang berbau diplomasi semata, namun lebih jauh lagi untuk memperlancar kerjasama antar negara dan kerjasama antar entiti-entiti negara (masyarakat, industri, perusahaan, dan lain-lain) dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi perdagangan, proses-proses politik, mekanisme hubungan sosial dan budaya, dan lain sebagainya.

***d. Government to Employees (G-to-E)***

Pada akhirnya aplikasi *E-Government* juga diperuntukkan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai negeri atau karyawan pemerintahan yang bekerja di sebuah institusi sebagai pelayan masyarakat.

**8. Penerapan E-Government di Indonesia**

Pembahasan mengenai penerapan *E-Government* bukan hanya menerapkan sistem pemerintahan secara elektronik saja, melainkan mempunyai pembahasan yang lebih mendalam daripada itu.

Pertama-tama yang harus dilihat adalah bagaimana sistem pemerintahan berjalan, sebelum penerapan *E-Government*, untuk menjalankan *E-Government* diperlukan suatu sistem informasi yang baik, teratur dan sinergi dari masing-masing lembaga pemerintahan, sehingga

dari kesemuanya itu bisa didapatkan suatu sistem informasi yang terjalin dengan baik. Karena dengan sistem informasi yang demikian akan memudahkan pemerintah dalam menjalankan fungsinya ke masyarakat. Sedangkan untuk mewujudkan sistem informasi yang baik, teratur dan sinergi antara lembaga pemerintahan, maka sistem informasi dari masing-masing lembaga pemerintahan harus memenuhi suatu standar sistem informasi, dimana standar ini meliputi persyaratan minimal untuk faktor-faktor dari sistem informasi tersebut.

Spektrum implementasi aplikasi *E-Government* sangatlah lebar mengingat banyaknya tugas dan tanggung jawab pemerintah sebuah negara yang berfungsi untuk mengatur masyarakatnya melalui berbagai jenis interaksi dan transaksi. Pengertian dan penerapan *E-Government* di sebuah negara tidak dapat dipisahkan dengan kondisi internal baik secara makro maupun mikro dari negara yang bersangkutan, sehingga pemahamannya sangat ditentukan oleh sejarah, budaya, pendidikan, pandangan politik, kondisi ekonomi, dari negara yang bersangkutan.

Dalam pengertian sistem informasi secara umum, maka unsur-unsur yang terkandung didalamnya adalah manusia, teknologi, prosedur dan organisasi. Kemudian dalam konteks *E-Government*, kita akan berbicara mengenai sistem informasi yang berbasis komputer, karena untuk mewujudkan *E-Government* tidak ada jalan lain bahwa yang harus dilakukan pertama adalah mengotomatisasi semua unsur yang terdapat dalam sistem informasi dan untuk memperlancar otomatisasi tersebut

maka dipergunakanlah teknologi ICT yang dapat mendukung yaitu komputer. Sistem informasi yang berbasis komputer menggunakan komponen-komponen seperti data, prosedur, manusia, software dan hardware.

Tetapi sebelumnya yang harus dibenahi adalah sistem informasi yang bukan berbasis komputer, karena otomatisasi tidak akan mempunyai pengaruh yang signifikan apabila sistem informasi yang bukan berbasis komputernya belum bagus. Dengan demikian tidaklah heran apabila negara yang dapat menjalankan *E-Government* hanyalah negara-negara maju (dalam konteks *E-Government* seutuhnya, bukan semata-mata situs informasi dari pemerintah). Karena untuk membereskan sistem informasi dalam satu lembaga pemerintah saja sudah sangat sulit apalagi harus tercapainya sinergi dari sistem informasi dari lembaga-lembaga pemerintahan, dan hal ini berkaitan erat dengan faktor budaya, politik dan ekonomi suatu negara.

Tujuan dari penerapan *E-Government* yang disarikan dari pemahaman negara-negara asing yang sudah menerapkan konsep ini, adalah mencapai efisiensi, efektifitas dan nilai ekonomis dari praktek layanan pemerintah ke masyarakat. Tetapi tujuan ini sebenarnya memiliki pengertian lebih, dimana yang diharapkan dari penerapan konsep *E-Government* adalah restrukturisasi sistem pemerintahan yang sudah ada agar hasil yang dicapai dengan menerapkan *E-Government* bisa maksimal. Hal ini berarti ada masalah sistem kerja, personil, dan

budaya kerja yang harus diperhatikan sebelum menerapkan *E-Government*.

Ada beberapa contoh dari penerapan konsep *E-Government* di Indonesia, yaitu Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, pada tahun 2001 menggelar koneksi online antar 26 kecamatan, sehingga semua aktivitas UPT (Unit Pelayanan Terpadu) dapat berjalan online. Dana yang dikeluarkan untuk menjalankan program ini senilai Rp 1,23 miliar. Kemudian contoh-contoh lainnya adalah di Kabupaten Tarakan, Kalimantan Timur, salah satu kabupaten di Sulawesi dan Riau yang sudah menyediakan informasi pemerintah daerah secara online. Apabila dilihat dari contoh yang telah disampaikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa praktek *E-Government* yang dilakukan oleh pemerintah daerah tersebut adalah yang berbentuk pelayanan pemerintah ke masyarakat dalam hal penyampaian informasi atau lebih jauh lagi pembuatan KTP online. Hal ini membuktikan bahwa hanya sedikit pemerintah daerah yang sudah mulai mengerti bahwa teknologi informasi dapat dipergunakan untuk mempermudah pekerjaan mereka dan bahkan melakukan hubungan dengan masyarakatnya. Walaupun hanya sebatas dalam bentuk pemberian informasi secara sepihak yaitu dari pemerintah ke masyarakat.

Esensi dari *E-Government* sebenarnya adalah masalah restrukturisasi dari sistem pemerintahan yang sudah ada. Sistem pemerintah adalah suatu sistem yang menjalankan praktek pemerintah dalam menjalankan

fungsi-fungsinya. Apabila sistem pemerintah yang dapat dikatakan sebagai pengatur dari suatu negara berjalan dengan buruk, maka ketika konsep *E-Government* ini diimplementasikan, keuntungan yang bisa didapat hanyalah keuntungan dari penggunaan teknologi informasi tersebut yang lebih bersifat teknis.

## **9. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan *E-Government***

Menurut hasil kajian dan riset Harvard JFK School of *Government* untuk menerapkan konsep-konsep digitalisasi pada sektor publik, ada tiga elemen sukses yang harus dimiliki dan diperhatikan sungguh-sungguh yaitu:

### **a. *Support*.**

Elemen pertama dan paling krusial yang harus dimiliki oleh pemerintah adalah keinginan (*intent*) dari berbagai kalangan pejabat publik dan politik untuk benar-benar menerapkan konsep *E-Government*, bukan hanya sekedar mengikuti trend atau justru menentang inisiatif yang berkaitan dengan prinsip-prinsip *E-Government*. Tanpa adanya unsur “*political will*” ini, mustahil berbagai inisiatif pembangunan dan pengembangan *E-Government* dapat berjalan dengan mulus. Karena budaya birokrasi cenderung bekerja berdasarkan model manajemen “top down”, maka jelas dukungan implementasi program *E-Government* yang efektif harus dimulai dari para pimpinan pemerintahan yang berada pada level tertinggi (Presiden dan para pembantunya – Menteri), sebelum

merambat ke level-level dibawahnya (Eselon 1, Eselon 2, Eselon 3, dan seterusnya).

**b. *Capacity*.**

Elemen kedua ini merupakan unsur kemampuan atau keberdayaandari pemerintah setempat dalam mewujudkan “impian” *E-Government* terkait menjadi kenyataan. Ada tiga hal minimum yang paling tidak harus dimiliki oleh pemerintah sehubungan dengan elemen ini, yaitu:

- 1) Ketersediaan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan berbagai inisiatif *E-Government*, terutama yang berkaitan dengan sumber daya finansial;
- 2) Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai karena fasilitas ini merupakan 50% dari kunci keberhasilan penerapan konsep *E-Government*, dan;
- 3) Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan agar penerapan *E-Government* dapat sesuai dengan asas manfaat yang diharapkan.
- 4) Perlu diperhatikan disini bahwa ketiadaan satu atau lebih elemen prasyarat tersebut janganlah dijadikan alasan tertundanya sebuah pemerintah tertentu dalam usahanya untuk menerapkan *E-Government*, terlebih-lebih karena banyaknya fasilitas dan sumber daya krusial yang berada diluar jangkauan (wilayah kontrol) pemerintah. Justru pemerintah harus mencari cara yang efektif

agar dalam waktu cepat dapat memiliki ketiga prasyarat tersebut, misalnya melalui usaha-usaha kerja sama dengan swasta, bermitra dengan pemerintah daerah/negara tetangga, merekrut SDM terbaik dari sektor nonpublik, mengalihdayakan (outsourcing) berbagai teknologi yang tidak dimiliki, dan sebagainya.

**c. Value.**

Elemen pertama dan kedua merupakan dua buah aspek yang dilihat dari sisi pemerintah selaku pemberi jasa (supply side). Berbagai inisiatif *E-Government* tidak akan ada gunanya jika tidak ada pihak yang merasa diuntungkan dengan adanya implementasi konsep tersebut; dan dalam hal ini, menentukan besar tidaknya manfaat yang diperoleh dengan adanya *E-Government* bukanlah kalangan pemerintah sendiri, melainkan mereka yang berkepentingan (demand side). Untuk itulah maka pemerintah harus benar-benar teliti dalam memilih prioritas jenis aplikasi *E-Government* apa saja yang harus didahulukan pembangunannya agar benar-benar memberikan value (manfaat) yang secara signifikan dirasakan oleh masyarakatnya. Salah dalam mengerti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat justru akan mendatangkan bumerang bagi pemerintah yang akan semakin mempersulit meneruskan usaha mengembangkan konsep *E-Government*. Penerapan *E-Government* meliputi:



1. Data infrastruktur, meliputi manajemen sistem, dokumentasi, dan proses kerja di tempat untuk men-yediakan kuantitas dan kualitas data yang berfungsi mendukung penerapan *e-Government*.
2. Infrastruktur legal, hukum dan pera-turan termasuk berbagai perizinan untuk mendukung menuju *e-Government*.
3. Infrastruktur institusional, diwujud-kan dengan institusi pemerintah secara sadar dan eksis melakukan dan memfokuskan tujuannya dalam penerapan *e-Government*.
4. Infrastruktur manusia, sumber daya manusia yang handal merupakan hal pokok yang harus dipersiapkan dalam penerapan *e-Government*.
5. Infrastuktur teknologi, penerapan *E-Government* banyak bertumpu pada adanya infrastruktur teknologi yang memadai.
6. Strategi pemikiran pemimpin, penerapan *E-Government* sangat membutuhkan pemimpin yang mem-bawa visi *E-Government* dalam agendanya dan memiliki strategi pemikiran untuk mewujudkannya.<sup>33</sup>

Proses munculnya sistem pemerintahan elektronik dapatdibagi menjadi tiga tahap sementara atau daerah dasar:

1. Keterbukaan publik, partisipasi, dan transaksi online. Keterbukaan Umum berarti penggunaanteknologi komunikasi terbaru untuk memastikan bahwa warga negara dan lembaga-lebagamasyarakat sipil memiliki akses yang lebih luas terhadap informasi yang menarik

---

<sup>33</sup> Indrajit, Richardus Ekodkk,op cit.hlm.13.

kepada mereka tentang badan otoritas negara dan lokal pemerintahan sendiri.

2. Partisipasi berarti bahwa warga negara memiliki lebih banyak dan lebih banyak kesempatan untuk ambil bagian dalam pengelolaan urusan negara dan masyarakat di semua tingkat otoritas dan mencakup siklus mempersiapkan dan membuat keputusan politik. Hal ini membutuhkan bahwa struktur negara dan kota mempublikasikan alamat kontak e-mail mereka pada situs Web yang sesuai, dan juga membentuk umpan balik.
3. Transaksi Online memungkinkan bagi lembaga-lembaga negara dan kota untuk menyediakan layanan melalui Internet, seperti pembayaran tagihan listrik, pengisian dari pajak dan pengumpulan pajak, dan pendaftaran asosiasi sipil dan kemudian, pendaftaran pengusaha tanpa status badan hukum, usaha kecil perusahaan, dan sebagainya.

## **BAB III**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Penerapan E-Government pada pemerintah daerah Kota Tegal**

##### **1. Sejarah Pemerintah Daerah Kota Tegal**

Secara historis dijelaskan bahwa eksistensi dari Kota Tegal tidak lepas dari peran Ki Gede Sebayu. Bangsawan ini adalah saudara dari Raden Benowo yang pergi ke arah Barat dan sampai di tepian sungai Gung. Melihat kesuburan tanahnya, Ki Gede Sebayu tergugah dan berniat bersama-sama penduduk meningkatkan hasil pertanian dengan memperluas lahan serta membuat saluran pengairan. Daerah yang sebagian besar merupakan tanah lading tersebut kemudian dinamakan Tegal.

Selain berhasil memajukan pertanian, dia juga merupakan ahli agama yang telah membimbing warga masyarakat dalam menanamkan rasa keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas jasanya tersebut, akhirnya dia diangkat menjadi pemimpin dan panutan warga masyarakat. Kemudian oleh Bupati Pemalang dikukuhkan menjadi sesepuh dengan pangkat Juru Demung atau Demang.

Pengangkatan Ki Gede Sebayu menjadi Pemimpin Tegal dilaksanakan pada perayaan tradisional setelah menikmati hasil panen padi dan hasil pertanian lainnya. Perayaan tersebut tepat di bulan punama tanggal 15 sapar tahun EHE 988 yang bertepatan dengan hari jumat

kliwon 12 April 1580. Dalam perayaan juga dikembangkan ajaran dan budaya agama islam yang hingga sekarang masih berpengaruh pada kehidupan masyarakat.

Hari, tanggal dan tahun Ki Gede Sebayu diangkat menjadi Juru Demung itu ditetapkan sebagai hari jadi Kota Tegal dengan peraturan Daerah No.5 tahun 1988 tanggal 28 Juli 1988.

## 2. Wilayah Kota Tegal

Letak geografis Kota Tegal diantara 109°08' - 109°10' Bujur Timur dan 6°50' - 6°53' Lintang selatan, didalam Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011 – 2031 pasal 1A nomor 2 Luas wilayah Kota Tegal adalah 3.924 Hektar . Batas wilayah administrasi Kota Tegal sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa , Sebelah Timur dan Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tegal dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Brebes. Kota Tegal terdiri dari 4 Kecamatan 27 Kelurahan antara lain :

**Tabel 1.1 Wilayah Administrasi Kota Tegal**

No	Kecamatan	Kelurahan	RW	RT
1	<b>Tegal Selatan</b>	Kalinyamat Wetan	4	17
		Bandung	5	22
		Debong Kidul	4	20

		Tunon	4	21
		Keturen	3	17
		Debong Kulon	4	18
		Debong Tengah	6	35
		Randugunting	12	89
2	<b>Tegal Timur</b>	Kejambon	6	43
		Slerok	6	45
		Panggung	14	137
		Mangkusuman	4	42
		Mintaragen	11	94
3	<b>Tegal Barat</b>	Pesurungan Kidul	2	14
		Debong Lor	3	15
		Kemandungan	3	13
		Pekauman	8	50
		Kraton	8	65
		Tegalsari	14	107
		Muarareja	3	15
4	<b>Margadana</b>	Kaligangsa	6	38
		Krandon	4	22
		Cabawan	4	17
		Margadana	11	49
		Kalinyamat Kulon	4	27

		Sumurpanggang	2	18
		Pesurungan Lor	3	21

*Sumber: BPS Kota Tegal, 2014*

### **3. Dasar Hukum Pembentukan Kota Tegal**

- a. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang perubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa;

- e. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 3 Maret 1988 Nomor 185.5-212 tentang Penetapan Batas Baru secara pasti antara Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
- f. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 136/113/88 tentang tindak lanjut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185.5-212 tentang Penetapan Batas Baru secara pasti antara wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
- g. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan memberlakukan semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Kota Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal.

#### **4. Visi Misi Kota Tegal**

##### **a. VISI KOTA TEGAL**

" Terwujudnya Pemerintahan yang Berdedikasi Menuju Kota Tegal yang Bersih, Demokratis, Disiplin dan Inovatif "

##### **b. MISI KOTA TEGAL**

- 1) Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Profesional, Akuntabel, Berwibawah dan Inovatif, Berbasis Teknologi Informasi

- 2) Menciptakan atmosfir kehidupan Kota Tegal yang lebih agamis, aman, kreatif, berbudaya, demokrasi, Melindungi hak-hak anak dan perempuan untuk kesetaraan serta keadilan gender
- 3) Meningkatkan pembangunan dibidang pendidikan, kesehatan, kesahtraan pekerja dan masyarakat tidak mampu
- 4) Meningkatkan infrastruktur, transportasi publik, lingkungan hidup yang bersih dan sehat serta pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada energi terbarukan
- 5) Meningkatkan Kepariwisataaan, investasi dan daya saing daerah serta mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Ekonomi Kreatif
- 6) Mengoptimalkan peran pemuda, pembinaan olah raga dan seni budaya<sup>34</sup>

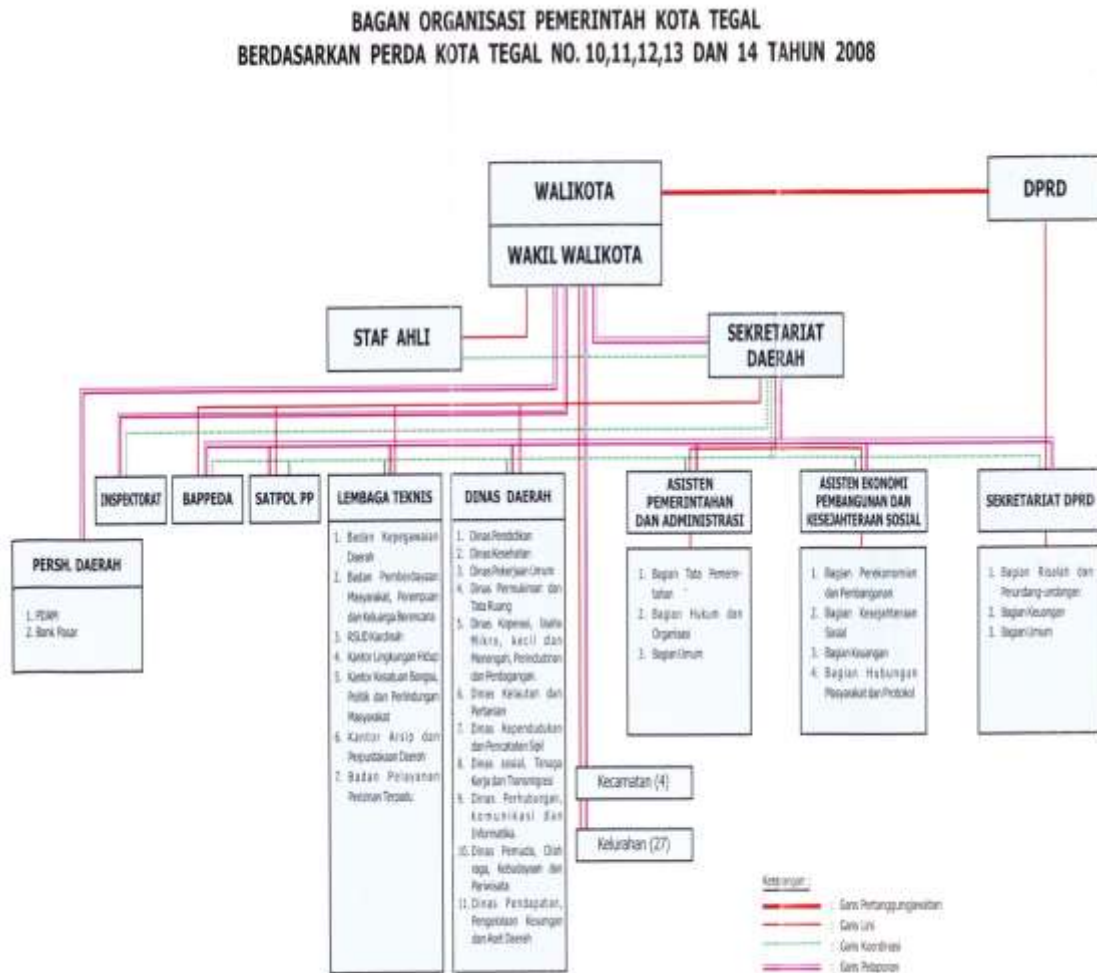
---

<sup>34</sup> <https://www.tegalkota.go.id/v2/index.php?lang=id>



## 5. Struktur Organisasi Kota Tegal

**Gambar 1.1 Bagan Organisasi PEMKOT Tegal**

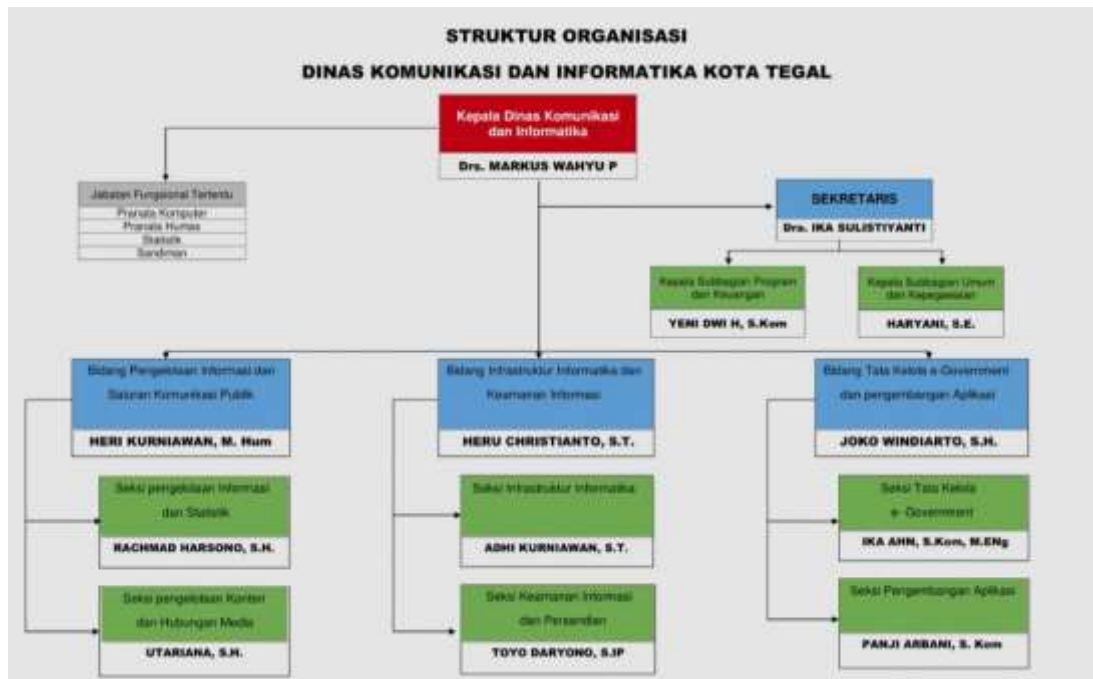


## 6. Gambaran umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tegal

Didalam Dinas Pasal 55 Peraturan Walikota No 18 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal, Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik, dipimpin oleh seorang Kepala

Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda .

**Gambar 1.2 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika**



#### a. Tugas dan Fungsi Dinas komunikasi dan informatika

Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika diatur dalam pasal 82 Peraturan Walikota No 18 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal .

Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika adalah membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika , bidang persandian, dan bidang statistik. Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah

- a) Perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik.
- b) Pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik.
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik.
- d) Pelaksanaan kesekretariatan Dinas Komunikasi dan Informatika.
- e) Pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Penerapan E-Government pada pemerintah daerah Kota Tegal, E-Government merupakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dan aplikasinya oleh pemerintah dalam hal penyediaan informasi dan layanan publik bagi masyarakat. Kota Tegal merupakan salah satu kota yang sudah menerapkan E-Government dibuktikan dengan adanya Peraturan walikota No.10 tahun 2018 tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal dan yang dijadikan acuan adalah Peraturan pemerintah No.95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Eletronik agar terwujudnya layanan publik yang berkualitas dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam melakukan penerapan E-Government, Pemerintah Kota Tegal melaksanakan berdasarkan asas:

- a. Manfaat, adil, dan merata
- b. Efektif dan efisien
- c. Keterpaduan
- d. Keamanan
- e. Dapat dipertanggungjawabkan

Selain itu, penerapan E-Government di Kota Tegal berjalan dengan baik karena adanya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Tegal. Bapak Drs.Johardi selaku Sekretariat Daerah ikut berperan dalam penerapan E-Government Kota Tegal.<sup>35</sup>

Koordinator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Daerah dijabat oleh Sekretaris Daerah yang diatur pada pasal 61 Peraturan Pemerintah No.95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dijelaskan mengenai kepala daerah dan tugasnya yang berkaitan dengan SPBE, diantaranya :

- 1) Setiap kepala daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah
- 2) Setiap kepala daerah menetapkan koordinator SPBE Pemerintah Daerah
- 3) Koordinator SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah

---

<sup>35</sup>Wawancara dengan Ika Aprilya, KASI Dinas Komunikasi Dan Informasi, di Dinas Komunikasi Dan Informasi Tegal, tanggal 30 Juli 2021 jam 12.00-14.00

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 28F Tujuan mendasar e-government adalah untuk meningkatkan hubungan pemerintah dan masyarakat melalui informasi tentang proses pemerintahan, dan adanya interaksi timbal balik antara masyarakat dan pemerintah. Sesuai dengan Peraturan Presiden No.95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Tujuan penerapan e-government di Pemerintah Kota Tegal juga mengacu pada perpres tersebut dalam penerapannya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya sehingga diperlukan sistem pemerintahann berbasis elektronik.

Adapun tujuan e-government dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu untuk :

- a. Meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Meningkatkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif;
- c. Sebagai sarana perbaikan organisasi, sistem manajemen dan proses kerja pemerintahan.

Dengan prosedur pelaksanaan e-government yang dilaksanakan sesuai Peraturan Walikota No.10 Tahun 2018 :

- a) Infrastruktur teknologi informasi dibangun dan dikelola oleh Dinas.
- b) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. *Data Center*;
  - b. *Disaster Recovery Center*;
  - c. *Local Area Network*;
  - d. *Metropolitan Area Network*;
  - e. *Internet Protocol Address Public*; dan
  - f. *Internet Bandwidth*.
- c) Infrastruktur teknologi informasi yang dibangun dan dikelola harus memperhatikan interoperabilitas, interkoneksi, kompatibilitas, teknologi yang terbuka, dukungan teknis, dan keamanan informasi.
- d) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar pembangunan dan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Jadi, Dinas Komunikasi Dan Informasi bertanggung jawab untuk menyediakan infrastruktur teknologi informasi bagi seluruh perangkat daerah. Sedangkan untuk pengembangan sistem / aplikasi dikembangkan oleh perangkat daerah bersama Dinas dan seluruh datanya harus saling terintegrasi pusat dengan Dinas.

Salah satu contoh penerapan *E-Government* adalah membuat aplikasi. Aplikasi disini berarti komponen sistem informasi yang terdiri atas kode-kode pemrograman untuk menjalankan fungsi, proses, dan mekanisme kerja yang mendukung pelaksanaan pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan Pemerintah Daerah. Sebagai bukti komitmen Pemerintah Kota Tegal dalam menerapkan *E-Government*,

Pemkot telah meluncurkan beberapa aplikasi yang bisa di akses oleh perangkat daerah maupun masyarakat kota tegal.

Aplikasi-aplikasi tersebut dapat di manfaatkan oleh masyarakat. Tetapi ada aplikasi SINOK yang hanya bisa diakses oleh ASN untuk mengisi presensi secara online. Aplikasi yang sudah diterapkan di Kota Tegal sudah ada 49 tetapi sebagian besar masih digunakan untuk proses kerja pegawai.<sup>36</sup> Jadi, dalam pelaksanaannya, masyarakat belum bisa memanfaatkan seluruh aplikasi yang sudah dimiliki oleh Pemerintah Kota Tegal. Selain aplikasi tersebut, pemerintah juga sudah menerbitkan Tanda Tangan Elektronik yang merupakan salah satu contoh penerapan E-Government di Kota Tegal. Tanda Tangan Elektronik merupakan persetujuan Penanda Tangan atas Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang ditanda tangani dengan tanda tangan elektronik tersebut termasuk hasil cetakannya. Sesuai pasal 20(1) Tanda Tangan Elektronik berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas identitas penanda tangan, dan keutuhan dan keautentikan informasi elektronik. Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah jika :

- a. Data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penanda tangan;
- b. Data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan hanya berada dalam kuasa penanda tangan;
- c. Segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;

---

<sup>36</sup> Wawancara dengan Ika Aprilya, KASI Dinas Komunikasi Dan Informasi, di Dinas Komunikasi Dan Informasi Tegal, tanggal 30 Juli 2021 jam 12.00-14.00

- d. Segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- e. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penanda tangannya; dan
- f. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penanda tangan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait.

Pasal 22 (1) Tanda Tangan Elektronik meliputi :

- a. Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi; dan
- b. Tanda Tangan Elektronik tidak tersertifikasi.

Pasal 22 (2) Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan:

- a. Dibuat dengan menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik; dan
- b. Dibuktikan dengan Sertifikasi Elektronik.

Ayat (3) Tanda Tangan Elektronik tidak tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuat tanpa menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik. Dan ayat (4) ketentuan lebih lanjut mengenai tanda tangan elektronik ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Dalam menerapkan *E-Government* di Kota Tegal tentunya akan ada hambatan. Hambatan tersebut bisa dari kesiapan badan pemerintahan, minimnya sarana prasarana dalam menerapkan *e-government* sehingga membuat pengembangannya tidak merata. Contohnya adalah terbatasnya



hardware dan software serta minimnya instansi pemerintah yang terhubung pada jaringan baik lokal (LAN) maupun global (Internet) menyebabkan perkembangan e-government tidak dapat berjalan lancar, sumber daya manusia yang kurang menguasai teknologi informasi dalam hal ini pejabat birokrasi maupun staff dalam memanfaatkan teknologi informasi masih sangat terbatas. Berdasarkan konsep yang dikemukakan Indrajit, bahwa terdapat beberapa indikator penting dalam penerapan *E-Government*, dimana indikator tersebut meliputi Infrastruktur Data, Infrastruktur Legal, Infrastruktur Institusional, Infrastruktur Manusia, Infrastruktur Teknologi.<sup>37</sup>

a) Infrastruktur Data

Infrastruktur data ini meliputi manajemen sistem, dokumentasi, dan proses kerja di tempat untuk menyediakan kuantitas dan kualitas data untuk mendukung penerapan *E-Government*.

Data infrastruktur merupakan dasar penerapan *E-Government* yang tercantum pada Peraturan Walikota No.10 Tahun 2018. Jika data tersebut tidak diperhatikan akan mempengaruhi penerapan *E-Government*. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dan penyimpanan data terkait penerapan *E-Government* di Pemerintah Kota Tegal sudah memadai.

b) Infrastruktur Legal

---

<sup>37</sup> Indrajit, Richardus Eko, loc.cit.

Dalam penerapan *E-Government* dibutuhkan infrastruktur legal dari lembaga atau penyedia layanan. Infrastruktur legal meliputi adanya dasar hukum, serta peraturan-peraturan dalam penerapan *E-Government*. Infrastruktur legal sangat diperlukan sebagai sebuah kekuatan hukum. Dengan begitu, maka penerapan *E-Government* mempunyai dasar hukum untuk menerapkannya dengan diimbangi oleh aturan-aturan yang berlaku. Dasar hukum E-Government Kota Tegal mengacu pada Perwal No.10 Tahun 2018 dan yang menjadi acuan adalah PP No.95 Tahun 2018.<sup>38</sup>

Jadi seluruh layanan aplikasi E-Government Kota Tegal diterapkan berdasarkan Peraturan Walikota Tegal Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan PP No.95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Masing-masing peraturan tersebut memuat pedoman tata cara dalam menjalankan *E-Government* agar bisa memberikan layanan yang berkualitas.

#### c) Infrastruktur Institusional

Penerapan *E-Government* harus ditunjang dengan infrastruktur institusional yang dapat diwujudkan apabila institusi pemerintah memiliki kesadaran dan eksis melaksanakan tujuannya. Infrastruktur institusional meliputi adanya koordinasi antar instansi, meningkatkan kerjasama serta memiliki komunikasi yang baik antar instansi terkait.

---

<sup>38</sup>Wawancara dengan Ika Aprilya, KASI Dinas Komunikasi Dan Informasi, di Dinas Komunikasi Dan Informasi Tegal, tanggal 30 Juli 2021 jam 12.00-14.00.

Untuk keberhasilan penerapan *E-Government* tersebut terkait dengan komunikasi antar instansi ini diperlukan ketepatan pemahaman dan konsistensi dalam mengomunikasikan dan sasaran tersebut juga diperlukan prosedur-prosedur yang memungkinkan pejabat atasan dan bawahan dapat melakukan komunikasi secara baik sehingga bawahan dapat bertindak sesuai harapan atasan. Kesadaran dan Koordinasi antar instansi dalam memberikan informasi merupakan langkah yang baik yang menjadikan kerjasama antar instansi akan semakin erat. Dengan demikian, maka penerapan *E-Government* akan berhasil jika memperhatikan faktor-faktor yang terdapat pada infrastruktur institusional tersebut.

#### d) Infrastruktur Manusia

Penerapan E-Government juga harus ditunjang dengan infrastruktur manusia. Karena jika infrastruktur manusia tidak diperhatikan maka penerapan *E-Government* tidak dapat tercapai dengan baik. Hal ini akan dapat terlihat dalam pelaksanaannya. Penempatan infrastruktur manusia harus sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya sesuai dengan tempat dalam penerapan *E-Government*. Jika hal tersebut tidak diperhatikan maka kebijakan penerapan akan terhambat. Tetapi masih terdapat pegawai di lingkungan pemerintah kota tegal yang kurang menguasai teknologi informasi.<sup>39</sup> Sehingga perlu diperhatikan lagi agar seluruh infrastruktur memperhatikan kemampuan setiap pegawainya. Dan perlu adanya

---

<sup>39</sup> Wawancara dengan Ika Aprilya, KASI Dinas Komunikasi Dan Informasi, di Dinas Komunikasi Dan Informasi Tegal, tanggal 30 Juli 2021 jam 12.00-14.00

pelatihan maupun pendampingan agar penerapan *E-Government* dapat di manfaatkan dengan baik.

e) Infrastruktur Teknologi

Dalam menunjang penerapan *E-Government* hal lain yang harus diperhatikan adalah infrastruktur teknologi. Infrastruktur teknologi sebagai faktor penting dalam penerapan *E-Government* karena merupakan sebuah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Sedangkan faktor penghambat atau kendala penerapan *e-Government* antara lain : **Pertama**, tidak adanya perhatian dari pemerintah, berbagai keterbatasan baik dari sumber daya finansial, infrastruktur teknologi informasi, maupun sumber daya manusia pengelola *E-Government* pegawai masih sangat kurang. **Kedua**, kendala juga berasal dari sisi masyarakat dengan adanya keterbatasan kemampuan masyarakat di dalam memanfaatkan fasilitas *E-Government* dikarenakan masyarakat belum sepenuhnya melek komputer ataupun internet.

**Gambar 1.3** Rangking *E-Government* Indonesia diantara 10 Negara Asia Tenggara Tahun 2020



Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Berikut 7 faktor yang menjadi sebab kegagalan proyek *e-government* yakni sebagai berikut :

1) *Organizational Power*

Dengan melihat kolaborasi antar lembaga terkait proses pelaksanaan e-government merancang pembagian kerja dan batasan-batasan yang tidak jelas akan menghambat pelayanan berbasis elektronik.

2) *Politics and Organizational Learning*

Melihat kemampuan pola komunikasi dan koordinasi antara penanggung jawab dengan pelaksana untuk mengendalikan layanan egovernment serta pembelajaran terhadap layanan terdahulu yang diterapkan.

3) *Education*

Kompetensi terhadap pelaksana layanan egovernment karena staf yang terkait memberikan dampak penghambat tidak disertai dengan kemampuan dalam menjalankan pelayanan.

4) *Project Management Issues*

Melihat kesesuaian kerja terhadap pelayanan yang diselenggarakan karena setiap kegiatan yang dilakukan terhadap e-government memiliki tujuan yang harus dicapai (*goals*) dan karakteristik terhadap layanan akan mempengaruhi jalannya pelayanan.

5) *Ambiguous Business needs and Unclear Vision*

Melihat adanya ketidakjelasan terhadap tujuan setiap instansi terkait karena kolaborasi antar organisasi memiliki visi dan misi yang berbeda dalam satu proyek pelayanan e-government.

6) *Security and Privacy Finance and Operational Cost*

Melihat keamanan dalam pelayanan e-government karena berkaitan dengan data masyarakat secara privat serta kesesuaian kebutuhan anggaran untuk pembangunan pelayanan.

7) *ICT and System Development Process*

Melihat kesesuaian kesepakatan stakeholder pada sistem terhadap pelayanan yang sudah dijalankan pada tenggat waktu sudah ditentukan, sistem yang tidak bekerja dengan optimal, pelayanan yang tidak mudah digunakan, sosialisasi terhadap pelayanan baru, serta respon dari masyarakat terhadap pelayanan berbasis *e-government* karena masyarakat adalah dampak dari pembuatan pelayanan tersebut.

**B. Tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah melalui *E-Government* di Kota Tegal**

Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2017 tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa Partisipasi Masyarakat adalah peran serta masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran-pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Agar bisa meningkatkan partisipasi masyarakat, pemerintah daerah melakukan sosialisasi mengenai peraturan daerah maupun rancangan peraturan kepala daerah dengan memanfaatkan

media informasi yang mudah dijangkau masyarakat dan pemerintah daerah perlu mengembangkan sistem informasi penyusunan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi. Dengan dikembangkannya *E-Government* dapat memudahkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat untuk mengetahui bagaimana tingkat partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Tegal dalam menerapkan *E-Government*. Beberapa kriteria dalam hal ini, diantaranya : Pengetahuan tentang penerapan *e-government* di Kota Tegal, Aplikasi pelayanan yang sudah diterapkan, Kendala dalam memanfaatkan aplikasi *e-government*, dan Saran untuk kemajuan penerapan *e-government* di Kota Tegal.

### 1. Pengetahuan tentang penerapan e-government di Kota Tegal

Terdapat responden sebanyak 36, hanya 60% yang sudah mengetahui adanya penerapan e-government di Kota Tegal dan 40% yang belum mengetahui. Tetapi masyarakat yang sudah mengetahui adanya penerapan *e-government* belum semuanya menerapkan aplikasi tersebut, hanya 40% yang sudah menggunakan.



*Sumber : data yang diolah 2021*

## **2. Aplikasi pelayanan yang sudah di terapkan di**

Pemerintah Kota Tegal sudah menciptakan beberapa aplikasi pelayanan yang dapat digunakan oleh seluruh masyarakat kota tegal. Dengan harapan agar aplikasi tersebut bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat. Aplikasi-aplikasi tersebut diantaranya :

### **1) Jakwir Cetem**

Jakwir Cetem adalah aplikasi yang diluncurkan Pemerintah Kota Tegal melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal. Jakwir Cetem layanan sistem online berbasis android yang akan memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan, baik Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Identitas Anak (KIA), Kartu Keluarga (KK) kemudian bisa dikirim ke masyarakat.

### **2) SINOK**

SINOK (Sistem Layanan Online Kepegawaian) termasuk aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Tegal untuk menyediakan layanan kepegawaian bagi ASN Pemerintah Kota Tegal. Layanan SINOK tidak bisa digunakan untuk seluruh masyarakat umum, hanya dapat di akses mudah ke layanan perseorangan berupa perekaman presensi atau kehadiran kerja online bagi ASN Pemerintah Kota Tegal.

### **3) Gulamadu**

Gulamadu (Gudang Layanan Masyarakat Terpadu) merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika

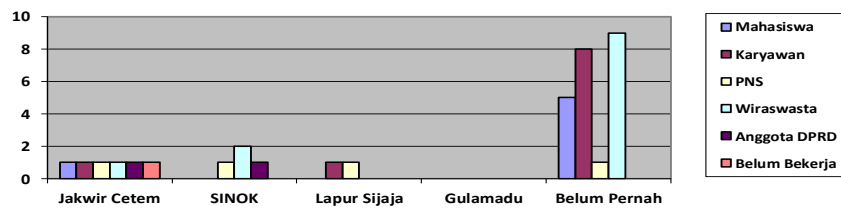


Kota Tegal untuk menyediakan layanna publik bagi warga Kota Tegal. Layanan Gulamadu menyediakan akses ke layanan perorangan, berupa:

- a. Surat Keterangan / Pengantar Kelurahan;
- b. Informasi Pajak Bumi dan Bangunan;
- c. Informasi Kendaraan Bermotor; dan
- d. Informasi Produk Hukum

#### 4) Lapur Si Jaja

Aplikasi yang diciptakan Pemerintah Kota Tegal melalui Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian yang memiliki inovasi berbasis TI guna memberikan layanan dibidang ketenaga kerjaan. Aplikasi ini untuk meningkatkan kualitas ketenagakerjaan secara komprehensif yang terintegrasi dari hulu ke hilir, dari masa sebelum, pada saat, dan setelah bekerja. Penerapan *E-Government* di masyarakat pastinya ada hambatan diantaranya adalah sebagian masyarakat tidak memiliki prasarana yang memadai atau tidak memahami prasarana tersebut contohnya adalah handphone. Di kota tegal sendiri ada beberapa aplikasi *e-government* yang hanya bisa digunakan dengan handphone tetapi masyarakat belum mengetahui adanya aplikasi *e-government* dan fungsi dari aplikasi tersebut . Kendala tersebut yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat.

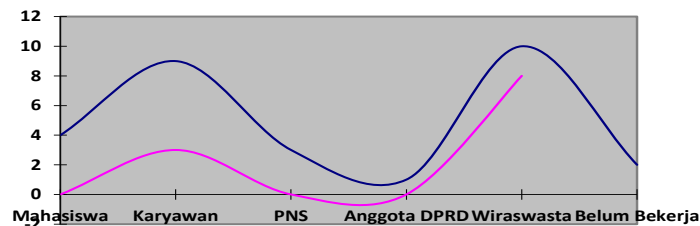


*Sumber : data yang diolah 2021*

Dari diagram diatas dapat disimpulkan bahwa hanya ada beberapa masyarakat yang telah menggunakan aplikasi tersebut. Masyarakat masih lebih banyak yang memilih untuk tidak menggunakan aplikasi *e-government* yang sudah disediakan oleh Pemerintah Kota Tegal.

### 3. Kendala dalam memanfaatkan E-Government

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan masyarakat, faktor yang menjadi penghambat ketika memanfaatkan e-government adalah akses dalam aplikasinya memerlukan waktu yang cukup lama. Kemudian adanya ketidak tahuan masyarakat tentang penerapan E-Government sehingga banyak masyarakat yang masih asing dan tidak ikut memanfaatkannya. Tetapi dari hasil wawancara dengan masyarakat juga menyebutkan bahwa *e-government* lebih mudah dilakukan secara online daripada offline.



*Sumber : data yang diolah 2021*

Dapat disimpulkan bahwa masyarakat masih sedikit untuk menerapkan E-Government tetapi ia lebih banyak memilih untuk melakukan pelayanan secara online daripada manual. Saran untuk kemajuan penerapan e-government di Kota Tegal supaya lebih banyak lagi dipublikasikan terhadap masyarakat. Masyarakat Kota Tegal sepertinya sudah banyak yg menggunakan smartphone hanya saja kurang teredukasi untuk pelayanan secara online, jadi masih banyak yg susah jika membutuhkan pelayanan di Kota Tegal padahal banyak sekali pelayanan online.<sup>40</sup> Didalam setiap proses pelayanan informasi seharusnya setiap instansi terkait mencantumkan status pemrosesan layanan informasi sehingga masyarakat dapat mengetahui sejauh mana proses dalam pemenuhan layanan informasi tersebut.<sup>41</sup> Ciptakan aplikasi yg simpel yg mudah di pahami masyarakat dan sosialisasikan *E-Government* secara merata ke semua lapisan masyarakat. Saran saya

<sup>40</sup> Wawancara dengan Masyarakat Kota Tegal, Di Tegal, tanggal 1 Agustus 2021 jam 12.00-14.00

<sup>41</sup> Wawancara dengan Masyarakat Kota Tegal, Di Tegal, tanggal 1 Agustus 2021 jam 12.00-14.00

lebih banyak lagi pelayanan publik yang masuk ke progan *E-Government*.<sup>42</sup>

Jadi masyarakat ingin agar Pemerintah Kota Tegal lebih mensosialisaikan atau mengenalkan pelayanan-pelayanan yang dapat di akses melalui aplikasi e-government kepada seluruh masyarakat dengan baik dan jelas agar seluruh masyarakat lebih bisa menerapkannya dan tentunya aplikasi tersebut dapat dikembangkan agar lebih lengkap dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat .

---

<sup>42</sup> Wawancara dengan Masyarakat Kota Tegal, Di Tegal, tanggal 1 Agustus 2021 jam 12.00-14.00

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian tentang penerapan *e-government* sebagai upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di Kota Tegal dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan *E-Government* Pemerintah Kota Tegal berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang menjadi acuan agar terwujudnya E-Government yang berkualitas dan menjadikan tata kelola pemerintahan yang baik. Jika dikaitkan dengan penerapan yang sudah ada di kota tegal, Pemerintah sudah menerapkan dan menyediakan banyak aplikasi E-Government untuk seluruh elemen masyarakat. Seperti, Jakwir Cetem, Lapur Sijaja, SINOK, Gulamadu, Pesata , dan masih ada banyak lagi. Hanya saja penerapan *E-Government* di Kota Tegal kurang dimengerti oleh elemen masyarakat sehingga tidak bisa di manfaatkan dengan optimal.
2. Tingkat Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah melalui E-Government dinilai masih pasif. Karena masyarakat merasa banyak mengalami kendala. Diantaranya adalah sebagian masyarakat masih tidak memiliki prasarana yang memadai untuk mengaksesnya. Seperti

handphone maupun data seluler. Selain itu, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui aplikasi-aplikasi E-Government padahal dari hasil wawancara dengan masyarakat, banyak masyarakat yang memilih menggunakan pelayanan online daripada manual.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan diatas, ada beberapa saran dari penulis bahwa perlu dilakukannya koordinasi – koordinasi antar Perangkat Daerah dengan Dinas Komunikasi dan Informasi untuk pengembangan aplikasi-aplikasi *E-Government* agar lebih mudah di akses oleh masyarakat maupun perangkat daerah. Kemudian dilakukannya Sosialisasi kepada masyarakat mengenai aplikasi – aplikasi yang sudah berjalan. Dan diadakannya pelatihan maupun pendampingan dari Dinas Komunikasi dan Informasi untuk Pegawai di lingkungan pemerintahan Kota tegal mengenai pemanfaatan teknologi informasi juga untuk masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adi Rianto , *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta : Granit, 2010.
- Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Graaf, H.J de, *Awal Kebangkitan Mataram, Masa Pemerintahan Senopati (De Regering Van Pemerintahan Senopati Ingalaga)* , Jakarta : Pustaka Grafiti Pers, 1985
- Hadjon, Philipus. M., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993.
- Haryanti, Amelia, *Sistem Pemerintahan Daerah*, Tangerang: UNPAM PRESS 2019.
- Hassan, Syaukani Rais , et al, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan (PUSKAB)*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2002
- Indrajit, Ricardius Eko *E-Government In Action*, Yogyakarta : ANDI, 2005.
- Indrajit, Richardus Eko, *Buku Pintar Linux: Membangun aplikasi E Government*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2002
- Lubis, M. Solly, *Pembahasan UUD 1945*, Bandung: Alumni, 1979.
- Manan, Bagir, *Perjalanan Historis Pasal 8 UUD 1945*, Jakarta: UNISKA, 1993
- Marzuki, *Metodologi Riset* , Yogyakarta : PT. Hanindita Offset, 1983.
- Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2013
- Saryono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Alfabeta, 2010
- Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 2005.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* , Jakarta : Universitas Indonesia Pers, 1986

- Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali Pers, 1985
- Soemitro Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimentri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1997.
- Soetoprawiro, Koerniatmanto, *Pemerintahan dan Peradilan di Indonesia (Asal usul dan perkembangannya)* , Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti, 1994.
- Sudjiono,Budi dan Dedy Rudianto, *Manajemen Pemerintahan Federal Perspektif Indonesia Masa Depan*, Jakarta:Citra Indah Pratama,2003
- Sugiyono, *Metedeologi Penelitian Kuantitatif,Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta, 2013.
- Surianingrat,Bayu, *Sejarah Pemerintahan di Indonesia (Babak Hindia Belanda dan Jepang)*, Jakarta:Dewaruci Press,1981.

#### **Peraturan Perundang – Undangan**

- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang – Undang
- Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government
- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2017 tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi.



### Artikel Ilmiah/ Jurnal dan Skripsi

- Santoso M Agus, 2017, *Otonomi Daerah Di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jurnal Ilmu Administrasi, Volume 6 Nomor 4.
- Habibullah, Achamad, 2010, *Kajian Pemanfaatan dan Pengembangan E-Government*, Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 23 Nomor 3.
- Sari, Kusuma Dewi Arum & Winarno, Wahyu Agus, 2012, *Implementasi E- Government System Dalam Upaya Peningkatan Clean and Good Government di Indonesia*, Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen, Volume 11 Nomor 12.
- Simandjuntak, Reynold, *Sistem Desentralisasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional*, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 7, No. 1.
- Putra, Mohammad Toha, 2017, *Evaluasi Partisipasi Masyarakat Dalam E - Government Pelayanan Publik di Kabupaten Boyolali*, Jurnal of Politic and Government Studies, Volume 66 Nomor 4.
- Nugraha, Joko Tri, 2018, *E-Government dan Pelayanan Publik (Studi Tentang Elemen Sukses Pengembangan E-Government di Pemerintah Kabupaten Sleman)*, Jurnal Komunikasi dan Kajian Media, Volume 2 Nomor 1.

### Website

<https://www.ayotegal.com/read/2020/03/11/2745/jumadi-paparkan-upaya-kota-tegal-menuju-5g>

<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/17471>

<https://www.tegalkota.go.id/v2/index.php?lang=id>

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muchammad Fauzan

NPM : 5117500044

Tempat/Tanggal Lahir : Tegal, 3 Agustus 1997

Program Studi : Ilmu Hukum

Alamat : Jalan Sugriwa No. 33 RT 12 / RW 2  
Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal  
Timur, Kota Tegal.

Riwayat Pendidikan :

No.	Nama Sekolah	Tahun Masuk	Tahun Lulus
1	SD Negeri Tegalsari 1	2003	2009
2	SMP Negeri 2 Tegal	2009	2012
3	SMA Negeri 4 Tegal	2012	2015
4	Universitas Pancasakti Tegal	2017	

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Tegal, 10 Agustus 2021

Hormat Saya,

Muchammad Fauzan

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **Lampiran 1**

Pertanyaan dan Jawaban dengan Pegawai Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Tegal Bagian E-Government :

**1. Peraturan manakah yang mendasari penerapan E-Government berbasis aplikasi/online di Kota Tegal ?**

Dasar hukum e-government kota tegal yaitu perwal no 10 tahun 2018 tentang pemanfaatan teknologi informasi

**2. Bagaimana kekuatan aturan hukum yang mendasari penerapan E-Government ini ?**

Dengan acuan PP no 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik

**3. Bagaimana peran Sekretariat Daerah di Kota Tegal terkait pelaksanaan E-Government di Kota Tegal ?**

Selaku tim Koordinator SPBE di Tingkat Kota Tegal

1. Setiap kepala daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah
2. Setiap kepala daerah menetapkan koordinator SPBE Pemerintah Daerah
3. Koordinator SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah

**4. Apakah tujuan yang ingin dicapai dari adanya penerapan E-Government di Kota Tegal ?**

Mengacu pada perpres tersebut dalam penerapannya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya sehingga diperlukan sistem pemerintahann berbasis elektronik

**5. Bagaimana prosedur pelaksanaan pada penerapan E-Government di Kota Tegal ?**

Dinas Komunikasi dan Informasi mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan infrastruktur teknologi informasi bagi seluruh OPD , contoh infrastruktur teknologi informasi internet dan pusat data . Sedangkan pengembangan sistem/aplikasi dikembangkan oleh masing-masing OPD bersama diskominfo dan wajib terintegrasi dengan diskominfo untuk aplikasi sebenarnya banyak ada sekitar 49,tetapi sebagian besar masih digunakan untuk proses kerja pegawai. Untuk masyarakat jakwir cetem,gula adu , layanan perijinan di ptsp , layanan aduan pju , pendaftaran layanan di puskesmas , RSUD Kardinah , lapur sijaja layanan yang bisa digunakan langsung oleh warga

**6. Apakah ada hambatan/kendala dalam pelaksanaan penerapan E-Government di Kota Tegal ?**

- Hambatannya 1 birokrasi antar pemerintah berbeda beda. Dalam hal ini yang menjadi prioritas opd tersebut berbeda beda. Jadi saat akan mengintegrasikan layanan dengan sistem menjadi kendala tersendiri
- Adanya Pegawai di lingkungan Pemerintahan Kota Tegal yang kurang menguasai teknologi informasi.
- Warga yang kurang menguasai Teknologi Informasi disebabkan karna prasarana dalam hal ini Handphone yang kurang memadai untuk menjalankan aplikasi tersebut dan warga yang kurang memahami penggunaan aplikasi tersebut

**7. Solusi apa yang diambil oleh Sekretariat Daerah untuk mengatasi hambatan/kendala dalam penerapan E-Government di Kota Tegal ?**

- Adanya pelatihan dan pendampingan dari Dinas Komunikasi dan Informasi untuk Pegawai di lingkungan pemerintahan Kota tegal mengenai pemanfaatan teknologi informasi
- Sosialisasi kepada masyarakat mengenai aplikasi – aplikasi yang sudah berjalan
- Koordinasi – koordinasi antar OPD dengan diskominfo

**8. Apa yang anda lakukan untuk penerapan E-Government ini apabila masyarakat tidak melek/gaptek dengan adanya teknologi ?**

Memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai aplikasi – aplikasi yang sudah berjalan agar bisa menggunakan.

## Lampiran 2

Kuisioner dengan judul penelitian “Penerapan E-Government Sebagai Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kota Tegal”

### Responden 1

Nama : Farah Dilah Nur Faiqo

Alamat : Jalan Abdul Ghoni , Pesurungan Kidul, Tegal

Pekerjaan : Karyawan

Usia : 23

Jenis Kelamin: P

E-Government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya. Tujuan adanya E-Government agar pemerintahan berjalan lebih efisien.

1. Apakah anda sudah mengetahui adanya penerapan E-Government di Kota Tegal ?

Jawab : sudah

2. Apakah anda pernah menggunakan layanan E-Government ?

Jawab : sudah

3. Aplikasi apa saja yang pernah anda gunakan ?

<input type="checkbox"/>	Gulamadu	<input type="checkbox"/>	Labur Sijaja
<input type="checkbox"/>	Jakwir Cetem	<input checked="" type="checkbox"/>	Belum Pernah
<input type="checkbox"/>	SiNok	<input type="checkbox"/>	Lainnya _____

4. Apakah ada kendala dalam penggunaan aplikasi tersebut ? (Jika ada sebutkan)

Jawab : tidak tahu

5. Menurut anda, lebih mudah dan cepat manakah pelayanan secara online atau manual ?

Jawab : online

6. Bagaimana saran anda untuk program E-Government kedepan di Kota Tegal ?

Jawab : lebih dikenalkan kepada masyarakat luas. Supaya pada mengerti

### **Responden 2**

Nama : Sugiyono, SE

Alamat : JL. Kurma 2 No.10 Kraton Tegal

Pekerjaan : Anggota DPRD Kota Tegal

Usia : 51

Jenis Kelamin: L

E-Government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya. Tujuan adanya E-Government agar pemerintahan berjalan lebih efisien.

1. Apakah anda sudah mengetahui adanya penerapan E-Government di Kota Tegal ?

Jawab : sudah tahu

2. Apakah anda pernah menggunakan layanan E-Government ?

Jawab : pernah menggunakan

3. Aplikasi apa saja yang pernah anda gunakan ?

<input type="checkbox"/>	Gulamadu	<input type="checkbox"/>	Labur Sijaja
<input checked="" type="checkbox"/>	Jakwir Cetem	<input type="checkbox"/>	Belum Pernah
<input type="checkbox"/>	SiNok	<input type="checkbox"/>	Lainnya _____

4. Apakah ada kendala dalam penggunaan aplikasi tersebut ? (Jika ada sebutkan)

Jawab : loadingnya lama

5. Menurut anda, lebih mudah dan cepat manakah pelayanan secara online atau manual ?

Jawab : online

6. Bagaimana saran anda untuk program E-Government kedepan di Kota Tegal ?

Jawab : harapan saya aplikasi yang digunakan semakin baik.. semakin canggih dan mudah

### Responden 3

Nama : Ika Widiyanti

Alamat : Jalan Sugriwa , Kel.Slerok, Kec.Tegal Timur, Kota Tegal

Pekerjaan : PNS

Usia : 37

Jenis Kelamin: P

E-Government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya. Tujuan adanya E-Government agar pemerintahan berjalan lebih efisien.

1. Apakah anda sudah mengetahui adanya penerapan E-Government di Kota Tegal ?

Jawab : ya

2. Apakah anda pernah menggunakan layanan E-Government ?

Jawab : ya

3. Aplikasi apa saja yang pernah anda gunakan ?

<input type="checkbox"/>	Gulamadu	<input checked="" type="checkbox"/>	Lapur Sijaja
<input checked="" type="checkbox"/>	Jakwir Cetem	<input type="checkbox"/>	Belum Pernah
<input checked="" type="checkbox"/>	SiNok	<input type="checkbox"/>	Lainnya _____

4. Apakah ada kendala dalam penggunaan aplikasi tersebut ? (Jika ada sebutkan)

Jawab : sejauh ini tidak ada

5. Menurut anda, lebih mudah dan cepat manakah pelayanan secara online atau manual ?

Jawab : secara online

6. Bagaimana saran anda untuk program E-Government kedepan di Kota Tegal ?

Jawab : agar di maintainen lagi secara rutin aplikasi-aplikasinya, di evaluasi lagi untuk penggunaan aplikasi nya, agar bisa lebih maksimal Pemkot Tegal dalam melayani masyarakat



**Responden 4**

Nama : Trinanda

Alamat : JL.Bandeng No.29 Rt 04 Rw 10, Kota Tegal

Pekerjaan : Belum Bekerja

Usia : 24

Jenis Kelamin: L

E-Government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya. Tujuan adanya E-Government agar pemerintahan berjalan lebih efisien.

1. Apakah anda sudah mengetahui adanya penerapan E-Government di Kota Tegal ?

Jawab : sudah

2. Apakah anda pernah menggunakan layanan E-Government ?

Jawab : sudah

3. Aplikasi apa saja yang pernah anda gunakan ?

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Gulamadu

Jakwir Cetem

SiNok

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Labur Sijaja

Belum Pernah

Lainnya \_\_\_\_\_

4. Apakah ada kendala dalam penggunaan aplikasi tersebut ? (Jika ada sebutkan)

Jawab : dibagian aplikasinya lemot. Hal tersebut membuat saya tidak menggunakan e-government. Percuma saja jika masyarakat tidak bisa mengaksesnya

5. Menurut anda, lebih mudah dan cepat manakah pelayanan secara online atau manual ?

Jawab : online, namun percuma jika aplikasi lemot. Karena hal tersebut saya tidak bisa menikmati e-government

6. Bagaimana saran anda untuk program E-Government kedepan di Kota Tegal ?

Jawab : sistem aplikasinya dibuat agar tidak lemot

**Responden 5**

Nama : Elsa Dian S

Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantara, Kalinyamat Kulon, Kota Tegal

Pekerjaan : Mahasiswa

Usia : 22

Jenis Kelamin: P

E-Government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya. Tujuan adanya E-Government agar pemerintahan berjalan lebih efisien.

1. Apakah anda sudah mengetahui adanya penerapan E-Government di Kota Tegal ?

Jawab : belum

2. Apakah anda pernah menggunakan layanan E-Government ?

Jawab : tidak pernah

3. Aplikasi apa saja yang pernah anda gunakan ?

<input type="checkbox"/>	Gulamadu	<input type="checkbox"/>	Labur Sijaja
<input type="checkbox"/>	Jakwir Cetem	<input checked="" type="checkbox"/>	Belum Pernah
<input type="checkbox"/>	SiNok	<input type="checkbox"/>	Lainnya _____

4. Apakah ada kendala dalam penggunaan aplikasi tersebut ? (Jika ada sebutkan)

Jawab : -

5. Menurut anda, lebih mudah dan cepat manakah pelayanan secara online atau manual ?

Jawab : online

6. Bagaimana saran anda untuk program E-Government kedepan di Kota Tegal ?

Jawab : masyarakat setempat mungkin perlu diadakan penyuluhan tentang E-Government khususnya pada RT/RW mereka atau bisa juga mengenalkan tentang E-Government melalui media sosial ataupun spanduk di berbagai titik keramaian Kota Tegal

**Responden 6**

Nama : Hasan

Alamat : Jalan Werkudoro Kel.Slerok Kec.Tegal Timur

Pekerjaan : Wiraswasta

Usia : 25

Jenis Kelamin: L

E-Government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya. Tujuan adanya E-Government agar pemerintahan berjalan lebih efisien.

1. Apakah anda sudah mengetahui adanya penerapan E-Government di Kota Tegal ?

Jawab : sudah

2. Apakah anda pernah menggunakan layanan E-Government ?

Jawab : belum pernah

3. Aplikasi apa saja yang pernah anda gunakan ?

<input type="checkbox"/>	Gulamadu	<input type="checkbox"/>	Labur Sijaja
<input type="checkbox"/>	Jakwir Cetem	<input checked="" type="checkbox"/>	Belum Pernah
<input type="checkbox"/>	SiNok	<input type="checkbox"/>	Lainnya _____

4. Apakah ada kendala dalam penggunaan aplikasi tersebut ? (Jika ada sebutkan)

Jawab : belum pernah menggunakan

5. Menurut anda, lebih mudah dan cepat manakah pelayanan secara online atau manual ?

Jawab : manual

6. Bagaimana saran anda untuk program E-Government kedepan di Kota Tegal ?

Jawab : ciptakan aplikasi yang simpel yang mudah dipahami masyarakat dan sosialisasikan E-Government secara merata ke semua lapisan masyarakat



Gambar 1  
Bersama Ibu Ika Aprilya sebagai KASI bidang E-Government Dinas Komunikasi dan Informasi